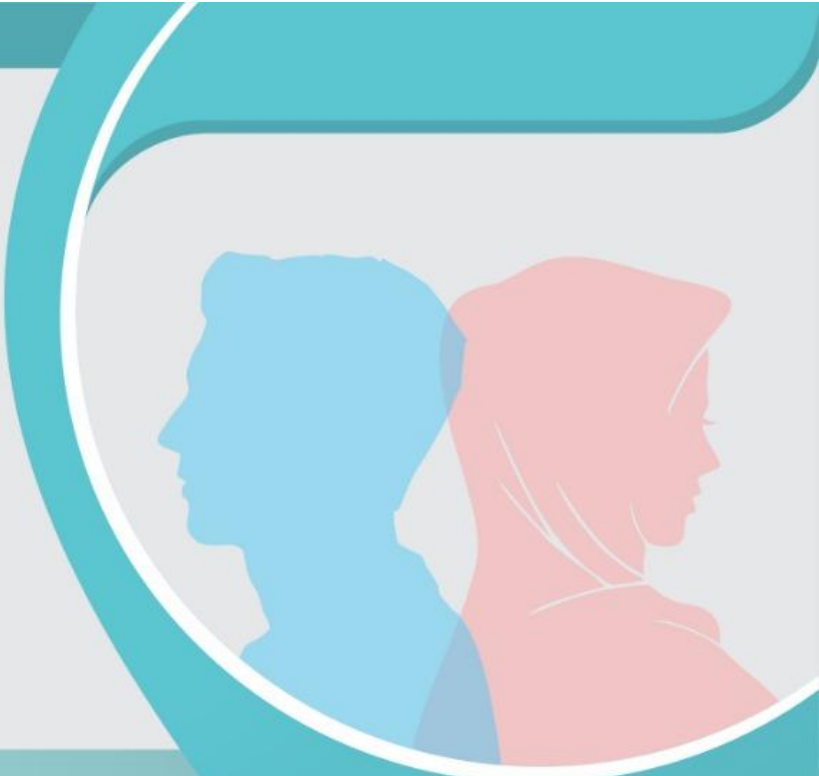




**PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI**



PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA BUKITTINGGI



**TAHUN
2019**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BUKITTINGGI**

PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019

TIM PENULIS :

TATI YASMARNI, SE, MM

NIRZA SASMITA, S.Sos, MM

NINI RAHMI, SKM

UTARI FERTIKA YOANDA, SE

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan hidayah Nya kepada kita semua, sehingga Tim Penulis telah dapat menyelesaikan penulisan buku “ Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2019. Shalawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan buku ini dilakukan dalam rangka menyediakan data dan informasi gender dan anak di Kota Bukittinggi Tahun 2018. Dalam buku ini disajikan profil perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan. Buku ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bukittinggi.

Kami menyadari dalam penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan gender banyak masalah yang belum terpecahkan akibat dari kurang tersediaan data yang relevan sampai sekarang sehingga kesetaraan dan keadilan gender belum terwujud secara optimal. Diharapkan dengan adanya buku ini OPD dan stakeholder lainnya dapat memanfaatkannya sebagai bahan pengambilan kebijakan pembangunan di bidang masing-masing.

Buku ini dapat kami susun berkat adanya jalinan kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dengan beberapa pihak terkait.

Oleh karena itu pada kesempatan ini Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tim Penulis yang telah bekerjasama dalam melaksanakan penulisan buku ini
2. Bapak / Ibu Kepala OPD , Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, Organisasi Perempuan dan LSM di Kota Bukittinggi yang telah memberikan berbagai sumbangan pemikiran saran dan masukan yang sangat berarti untuk kesempurnaan buku ini.
3. Bapak/ ibu anggota kelompok kerja Data terpilah Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2018, yang telah berpartisipasi aktif dalam memberika sumbangan saran /pemikiran dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan buku ini.

Semoga semua dukungan dan bantuan yang diberikan menjadi amal shaleh disisiNya.

Kami menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritik, saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, September 2019

Kepala Dinas P3APPKB

Kota Bukittinggi



TATI YASMARNI, SE, MM
NIP. 19630629 198302 2001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Sumber Data	2
D. Sistematika Penyajian	2
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH	5
A. Letak Geografis dan Batas Administrasi Wilayah	5
B. Batas Administrasi Wilayah	5
BAB III DATA GENDER BIDANG KEPENDUDUKAN	8
A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin	8
B. Penyebaran Penduduk	9
C. Penduduk Produktif	10
D. Komposisi Penduduk Menurut Wajib KTP	13
E. Kepemilikan Akte Kelahiran untuk Anak	14
F. Komposisi Penduduk menurut Status Perkawinan	15
G. Kepala Keluarga Perempuan	16
BAB IV DATA GENDER BIDANG PENDIDIKAN	17
A. Angka Partisipasi Kasar	18
B. Angka Partisipasi Murni	22
C. Angka Partisipasi Sekolah	26
D. Melek Huruf dan Buta Huruf	27
E. Angka Putus Sekolah	28
F. Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi	28
G. Rata-Rata Lama Sekolah	29
H. Sertifikasi Guru	30
I. Angka Kelulusan Paket A, B dan C	31
J. Sekolah Luar Biasa (SLB)	31
K. Akses Terhadap Internet dan Teknologi	32
BAB V GENDER DAN ANAK BIDANG KESEHATAN	33
A. Angka Harapan Hidup	33
B. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)	34
1. Penyebab Kematian Ibu Melahirkan	36
2. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) dengan Kompetensi Kebidanan	36
3. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Antenatal Care)	37
4. Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil	38

5. Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe)	40
C. Angka Kematian Bayi	41
1. Bayi yang mendapatkan Asi Eksklusif (0-6 bulan).....	42
2. Pelayanan Kesehatan Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	44
3. Pelayanan Imunisasi lengkap pada Bayi 0-11 bulan	44
4. Upaya Penanggulangan Gizi Buruk pada Balita	45
D. Posyandu	46
E. Penderita HIV/AIDS	47
F. Keluarga Berencana	48
G. Usia Perkawinan Pertama	49
H. Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)	49
BAB VI. EKONOMI DAN KETENAGA KERJAAN	50
A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	53
B. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	53
C. Status Pekerjaan	54
D. Lapangan Usaha	55
E. Pekerja di Sektor Formal dan Informal	56
F. Usaha Mikro dan Kecil (UKM)	57
G. Koperasi	60
H. Kepala Keluarga Miskin	61
I. Kepala Rumah Tangga Perempuan	61
J. Pekerja pada Instansi Lembaga Pemerintah /Non pemerintah .	62
BAB VII BIDANG POLITIK DAN PENGAMBIL KEPUTUSAN	65
A. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	66
B. Peran dan Komposisi Perempuan di Lembaga Eksekutif	68
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	68
2. Perempuan Menduduki Jabatan Eselon	69
3. Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin	70
4. Camat	70
5. Jumlah Lurah di Kota Bukittinggi	70
C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif	72
1. Jaksa menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	72
2. Hakim menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	73
3. Polisi menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	74
D. Pengurus Organisasi Sosial, Masyarakat dan Politik	75
1. Data Organisasi Sosial, Masyarakat dan Politik.....	75
2. Pengurus Harian Partai Politik	77
3. Kaukus Perempuan Politik	77
4. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	78
BAB VIII BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA	79
A. Bidang Hukum	79
1. Program /Kegiatan yang Responsif Gender Kota Bukittinggi	79

B.	Bidang Sosial Budaya	93
1.	Anak Jalanan	93
2.	Anak Terlantar	94
3.	Anak yang ditampung Panti Asuhan.....	94
4.	Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan	95
5.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	95
6.	Penduduk Lansia menurut Pendidikan yang ditamatkan	96
BAB IX	KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK.....	97
A.	Kekerasan Terhadap Perempuan	97
B.	Kekerasan Terhadap Anak	103
BAB X	PENUTUP	107
A.	Kesimpulan	107
B.	Saran	110

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Bukittinggi	7
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Bukittinggi Tahun 2018	9
Tabel 3.2	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi	10
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Yang Wajib Memiliki KTP dan Telah Memiliki KTP Elektronik per-Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2018.....	14
Tabel 3.4	Presentase Anak Usia 0-18 tahun yang Memiliki Akte Kelahiran menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	15
Tabel 3.5	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas menurut Status Perkawinan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	16
Tabel 3.6	Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi tahun 2018.....	16
Tabel 4.1	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP dan SLTA dan Jenis Kelamin per-Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2018	27
Tabel 4.2	Persentase Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Penduduk Umur 15 tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi tahun 2018.....	29
Tabel 4.3	Jumlah Guru yang Telah Menerima Sertifikasi Guru Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2018	30
Tabel 4.4.	Jumlah SLB Negeri dari Swasta Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018	31
Tabel 4.5.	Persentase Anggota Rumah Tangga Usia 5 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kelamin Memiliki /Menggunakan Teknologi Informasi 3 Bulan Terakhir Tahun 2018	32
Tabel 5.1.	Penyebab Kematian Ibu Melahirkan pada Tahun 2018	36
Tabel 5.2.	Cakupan Persalinan yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) per-Kecamatan dolong Oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) per-Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018....	37
Tabel 5.3	Cakupan Pelayanan Ante Natal Care per-Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2018.....	38
Tabel 5.4.	Cakupan Imunisasi TT pada Bumil Per-Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2018	39
Tabel 5.5	Cakupan Tablet Fe pada Bumil per-Kecamatan Kota Bukittinggi tahun 2018.....	41
Tabel 5.6	Cakupan BBLR yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan per-Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2018.....	44
Tabel 5.7	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap per-Kecamatan di Kota Bukittinggi taun 2018.....	45
Tabel 5.8	Cakupan Balita Bawah Garis Merah per-Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2018.....	45

Tabel 5.9.	Cakupan Balita Stunting per-Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2018	46
Tabel 5.10.	Jumlah Posyandu menurut Strata Posyandu per-Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2018	46
Tabel 5.11.	Cakupan Penderita HIV/AIDS Berdasarkan Kelompok Umr di Kota Bukittinggi tahun 2018	47
Tabel 5.12.	Jumlah Peserta KB Aktif per-Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2018	48
Tabel 5.13.	Peserta KB baru (PB) per-Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2018	49
Tabel 5.14.	Usia Perkawinan Pertama per-Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2018	49
Tabel 6.1.	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2018	52
Tabel 6.2.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Bukittinggi Tahun 2018	54
Tabel 6.3.	Persentase Penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang Bekerja di Kegiatan Informal Menurut Pekerjaan Utama di Kota Bukittinggi tahun 2018	56
Tabel 6.4	Jumlah Pedagang yang Berusaha pada Petak Toko dan Los Menurut Lokasi di Kota Bukittinggi tahn 2018.....	56
Tabel 6.5	Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Status Formal dan Informal di Kota Bukittinggi tahun 2018.....	57
Tabel 6.6	Jumlah Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) Kota Bukittinggi tahun 2018.....	58
Tabel 6.7	Data Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin pada UMKM per Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2018.....	58
Tabel 6.8.	Data Umum Industri di Kota Bukittinggi tahun 2018	59
Tabel 6.9.	Partisipasi Perempuan sebagai Anggota Koperasi per Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2018	60
Tabel 6.10	Partisipasi Perempuan sebagai Pengurus Koperasi per-Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2018	60
Tabel 6.11	Persentase Kepala Keluarga Miskin di Kota Bukittinggi tahun 2018	61
Tabel 6.12	Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kota Bukittinggi tahun 2018.....	62
Tabel 6.13	Tenaga Kerja di Lembaga/BUMN/BUMD/Instansi Vertikal tahun 2018	62
Tabel 6.14	Tenaga Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Tahun 2018 di Kota Bukittinggi	63
Tabel 6.15	Jumlah Tenaga Kesehatan (Medis) di Kota Bukittinggi Tahun 2018	64
Tabel 7.1	Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi menurut Partai dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2017	66
Tabel 7.2	Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi menurut Komisi dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2017	67

Tabel 7.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017	68
Tabel 7.4	Jumlah PNS menurut Golongan, Ruang dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017	69
Tabel 7.5	Jumlah PNS menurut Esselon dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2018	69
Tabel 7.6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin Tahun 2018	70
Tabel 7.7	Jumlah Camat di Kota Bukittinggi Tahun 2017	70
Tabel 7.8	Jumlah Lurah menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018	71
Tabel 7.9	Jumlah Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2017	71
Tabel 7.10	Data Hakim menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017	73
Tabel 7.11	Data Kepolisian menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017	74
Tabel 7.12	Data Organisasi Sosial, Masyarakat dan Politik Tahun 2017	75
Tabel 7.13	Jumlah Pengurus Harian Partai Politik Menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi tahun 2017	77
Tabel 7.14	Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Bukittinggi menurut Jenis Kelamin	78
Tabel 8.1	Kebijakan/Program/Kegiatan yang Responsif Gender di Kota Bukittinggi Tahun 2017	79
Tabel 8.2	Peraturan dan Kebijakan Daerah yang Responsif Gender 5 Tahun Terakhir	83
Tabel 8.3	Peraturan dan Kebijakan Daerah yang terkait Perlindungan Perempuan dan Anak	86
Tabel 8.4	Daftar Lembaga Masyarakat/Organisasi Masyarakat/LBH yang Peduli Perempuan dan Anak Tahun 2015 s/d 2017	88
Tabel 8.5.	Jumlah Anak Jalanan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2015, 2016 dan 2017	93
Tabel 8.6.	Jumlah Anak Terlantar(Karena Putus Sekola) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2018	94
Tabel 8.7.	Jumlah Anak yang Ditampung di Panti Asuhan dan Non Panti Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2016, 2017 dan 2018	94
Tabel 8.8.	Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat di Kota Bukittinggi Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2016, 2017 dan 2018	95
Tabel 8.9	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2018	95
Tabel 8.10	Persentase Penduduk Tertinggi yang ditamatkan Penduduk Umur 60 tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi tahun 2018	96

Table 9.1.	Perempuan Korban Kekerasan menurut umur Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018	97
Table 9.2.	Perempuan Korban Kekerasan menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018	97
Table 9.3.	Perempuan Korban Kekerasan menurut Status Pekerjaan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018	98
Table 9.4.	Perempuan Korban Kekerasan menurut Status Perkawinan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.	99
Table 9.5.	Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018	99
Table 9.6.	Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Pelayanan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018	101
Tabel 9.7	Perempuan Korban Kekerasan menurut Frekuensi Kekerasan Per Kecamatan di kota Bukittinggi Tahun 2018	101
Tabel 9.8	Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018 ..	102
Table 9.9.	Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan menurut Status Pekerjaan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018....	102
Table 9.10.	Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan menurut Hubungan Dengan Korban Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018	103
Table 9.11.	Jumlah Anak Korban Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan dan Jenis Kelamin, Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018	103
Table 9.12.	Korban Eksploitasi Seksual Anak Menurut Tempat Kejadian dan Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018	104
Table 9.13.	Lembaga Layanan Yang Menangani Anak Korban Kekerasan, Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018..	105
Table 9.14.	Jumlah Korban Kekerasan Pada Anak Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Kota Bukittinggi	6
Gambar 3.1	Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur Produktif Bukittinggi	11
Gambar 3.2	Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur Produktif Kota Bukittinggi	11
Gambar 3.3	Perbandingan Penduduk Produktif berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi tahun 2018	12
Gambar 4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SD Laki-Laki per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018	18
Gambar 4.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SD Perempuan per-Kecamatan di Kota Bukittinggi	19
Gambar 4.3	APK Siswa SD menurut Jenis Kelamin Kota Bukittinggi tahun 2018	19
Gambar 4.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SMP Laki-Laki per-Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018	20
Gambar 4.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SD Perempuan per-Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018	21
Gambar 4.6	APK Siswa SLTP Menurut Jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2018	21
Gambar 4.7	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan SD dan Jenis Kelamin per Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2018	23
Gambar 4.8	Perbandingan APM Siswa SD Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bukittinggi tahun 2018	24
Gambar 4.9	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan SLTP dan Jenis Kelamin per Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2018	24
Gambar 4.10	Perbandingan APM Siswa SLTP tahun 2015 s/d 2018 Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bukittinggi	25
Gambar 4.11	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur (7-12, 13-15, dan 16-18 tahun) dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi tahun 2018	26
Gambar 4.12	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki di Kota Bukittinggi tahun 2018	28
Gambar 4.13	Jumlah Angka Kelulusan Paket A, B, C berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bukittinggi tahun 2018	31
Gambar 5.1	Umur Harapan Hidup Kota Bukittinggi dari Tahun 2015 s/d 2018.....	34
Gambar 5.2	Jumlah Kematian Ibu di Kota Bukittinggi tahun 2015 s/d 2018	35
Gambar 5.3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Bukittinggi tahun 2015 s/d 2018.....	42

Gambar 5.4.	Cakupan Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018	43
Gambar 5.5.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Modern yang Pernah digunakan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	48
Gambar 5.6	Jumlah Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat Aditif lainnya (NAPZA) menurut Jenis kelamin Tahun 2018	50
Gambar 6.1.	Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin tahun 2018	53
Gambar 6.2	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke atas termasuk Pengangguran Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	54
Gambar 6.3	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kota Bukittinggi tahun 2018.	55
Gambar 9.1.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan di Kota Bukittinggi Tahun 2018	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif gender, penyediaan data, analisis dan pelaporan terpilah menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang pengalaman khusus dalam kehidupan sebagai perempuan dan pengalaman sebagai laki-laki. Data menurut jenis kelamin ini merupakan data dasar untuk melakukan analisa gender dan harus dikombinasi dengan variable-variabel lainnya (sesuai dengan keperluannya) seperti umur, pendidikan, status sosial-ekonomi, latar belakang budaya, kecacatan. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin juga menjadi inti dalam menghasilkan Gender Statistik yaitu informasi yang mengandung isu gender, sebagai hasil dari analisis gender

Platform Tindak Lanjut kesepakatan Konperensi Perempuan Sedunia di Beijing (Beijing Platform for Action, 1995) yang meminta layanan statistik ditingkat nasional (sub-nasional), regional dan internasional menghasilkan: (1) statistik yang berkaitan dengan individu, dikumpulkan, disusun, dianalisa dan disampaikan menurut jenis kelamin dan umur; dan yang mencerminkan masalah/isu yang berkaitan dengan kehidupan perempuan dan kehidupan laki-laki dalam masyarakat (United Nations, 1995, pasal 206 (a). Di Indonesia mengenai data terpilah ini tercantum dalam Inpres no.9 Tahun 2000.

Penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan umur serta analisisnya menjadi suatu keharusan, khususnya terkait dengan input bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) diseluruh bidang pembangunan serta untuk pengembangan kebijakan yang responsif gender. (Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000).

Untuk itu diperlukan pelembagaan data terpilah yang masuk kedalam data sistem; pemutakhiran data secara periodik; dilengkapi peraturan dan mekanisme yang mendukung; serta sumberdaya manusia yang paham dan terampil dalam melakukan analisa/ menghasilkan gender statistik.

B. Tujuan

Penyusunan buku ini bertujuan untuk :

1. Memperkuat kelembagaan terkait pengelolaan data gender dan anak.
2. Membangun mekanisme dan mendorong pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi dalam upaya ketersediaan data gender dan anak di Kota Bukittinggi.
3. Mendorong pemanfaatan data gender dan anak untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak di Kota Bukittinggi.
4. Meningkatkan komitmen pemerintah Kota Bukittinggi dalam melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data Informasi Gender dan Anak.
5. Sebagai bahan untuk mengambil kebijakan untuk perencanaan pembangunan yang responsif gender melalui PPRG.

C. Sumber Data

Data-data yang disajikan dalam Profil Gender dan anak Kota Bukittinggi Tahun 2019 ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2019 sesuai Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45-158-2018 tanggal 18 Mei 2018.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Buku Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- A. latar Belakang
 - B. Tujuan
 - C. Sumber Data
 - D. Sistematika Penyajian

- BAB II : Gambaran Umum Wilayah
- A. Letak Geografis dan Batas Administrasi Wilayah
 - B. Batas Administrasi Wilayah
- BAB III : Kependudukan
- A. Penduduk menurut Jenis Kelamin
 - B. Penyebaran Penduduk
 - C. Penduduk Produktif
 - D. Komposisi Penduduk Menurut KTP
 - E. Kepemilikan Akte Kelahiran untuk anak
 - F. Komposisi Penduduk menurut status perkawinan
 - G. Kepala Keluarga Perempuan
- BAB IV : Profil Gender dan Anak Bldang Pendidikan
- A. Angka Partisipasi Kasar
 - B. Angka Partisipasi Murni
 - C. Angka Partisipasi Sekolah
 - D. Angka Melek Huruf
 - E. Angka Putus Sekolah
 - F. Penduduk menurut Jenis Pendidikan Tertinggi
 - G. Rata-rata lama sekolah
 - H. Serifikasi guru
 - I. Angka kelulusan Paket A, B, C
 - J. Sekolah Luar Biasa (SLB)
 - K. Akses Terhadap Informasi dan Teknologi
- BAB V : Profil Gender dan Anak Bldang Kesehatan
- A. Angka Harapan Hidup
 - B. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)
 - C. Angka Kematian Bayi
 - D. Posyandu
 - E. Penderita HIV/ AIDS
 - F. Keluarga Berencana
 - G. Usia Perkawinan Pertama
 - H. Pengguna NAPZA

- BAB VI : Ekonomi dan Ketenagakerjaan
- A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
 - B. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
 - C. Satus Pekerjaan
 - D. Lapangan Usaha
 - E. Pekerja di Sektor Formal dan Informal
 - F. Usaha Mikro dan Keil (UKM)
 - G. Koperasi
 - H. Kepala Keluarga Miskin
 - I. Kepala Rumah Tangga Perempuan
 - J. Pekerja pada Instansi Lembaga /Non Pemerintah
- BAB VII : Perempuan di bidang Politik dan Pengambil Keputusan
- A. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif
 - B. Peran dan Komposisi Perempuan di Lembaga Eksekutif
 - C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif
 - D. Pengurus Organisasi Sosial, kemasyarakatan dan politik
- BAB VIII : Hukum dan Sosial Budaya
- A. Bidang Hukum
 - B. Bidang Sosial Budaya
- BAB IX : Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- A. Kekerasan Terhadap Perempuan
 - B. Kekerasan terhadap Anak
- BAB X : Penutup
- A. Kesimpulan
 - B. Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. Letak Geografis dan Batas Administrasi Wilayah

Kota Bukittinggi adalah sebuah kota yang terletak di bagian utara Provinsi Sumatera Barat. Dua kata yang terhimpun jadi satu, mempunyai makna identik dengan letaknya pada ketinggian perbukitan. Kota ini memiliki luas 25,24 km² membentang antara 100°20' - 100°25' Bujur Timur dan antara 00°16' - 00° 20' Lintang Selatan.

Posisi ini menjadikan iklim di Bukittinggi masuk kedalam iklim tropis. Letak Bukittinggi pada ketinggian antara 780 - 950 meter di atas permukaan laut, menyebabkan udara di Bukittinggi relatif sejuk dengan suhu berkisar antara 16.1–24.9°C dan cocok untuk tempat peristirahatan dan tujuan wisata.

Letak geografis ini cukup strategis, terutama bila dikaitkan dengan posisi sentral Bukittinggi terhadap lintasan regional antar ibukota provinsi, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan dari Padang ke Pekanbaru.

B. Batas Administrasi Wilayah

Secara administrasi Kota Bukittinggi berbatasan dengan beberapa wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Agam, yaitu :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau; Kecamatan Tilatang Kamang; Kabupaten Agam.
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nagari Banuhampu; Kecamatan Banuhampu Sungai Puar; Kabupaten Agam.
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Nagari Sianok, Guguk, dan Koto V Gadang; Kecamatan IV Koto; Kabupaten Agam.
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang; Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam.

Bukittinggi merupakan pusat kebudayaan Sumatera Barat, terletak di dataran tinggi sebelah utara Padang di bukit Agam. Berbeda dengan Padang yang merupakan pusat roda pemerintahan dan perdagangan modern maka Bukittinggi adalah kota yang tenang dihiasi oleh panorama alam yang sungguh tiada duanya.

Lembahnya yang sangat terkenal adalah Ngarai Sianok dengan kedalaman 100 m dan kemiringan antara 800-900 adalah salah satu daya tarik kota Bukittinggi dijadikan sebagai kota wisata.

Kota Bukittinggi memiliki nama lain yaitu Tri Arga yang artinya tiga pegunungan agung yang memberikan keberuntungan. Keagungan Gunung Merapi, Gunung Singgalang dan Gunung Sago pun ikut menghiasi moleknnya kota Jam Gadang ini. Kota Bukittinggi adalah nama sebuah kota yang terletak di bagian utara Provinsi Sumatera Barat.

Kota ini memiliki topografi berbukit-bukit dan berlembah, beberapa bukit tersebut tersebar dalam wilayah perkotaan, di antaranya Bukit Ambacang, Bukit Tambun Tulang, Bukit Mandiangin, Bukit Campago, Bukit Kubangkabau, Bukit Pinang Nan Sabatang, Bukit Cangang, Bukit Paninjauan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat lembah yang dikenal dengan Ngarai Sianok dengan kedalaman yang bervariasi antara 75-110 m, yang di dasarnya mengalir sebuah sungai yang disebut dengan Batang Masang.

Gambar 2.1. Peta Kota Bukittinggi.



Luas wilayah Kota Bukittinggi adalah 25,24 km² dengan perincian luas per kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Luas (km2)	Persentase (%)
1.	Mandiingin Koto Selayan (MKS)	12,156	48
2.	Guguk Panjang (GP)	6,831	27,06
3.	Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB)	6,252	24,77
Jumlah		25,24	100

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi Tahun 2018.

BAB III

GENDER DAN ANAK BIDANG KEPENDUDUKAN

Data kependudukan salah satunya digunakan untuk melihat tren dinamika penduduk sebagai monitoring dan evaluasi program pembangunan. Penduduk merupakan sumber daya manusia yang melakukan dan melaksanakan pembangunan sekaligus merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus komponen output dalam pembangunan. Oleh karena itu pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

A. Penduduk Menurut Jenis kelamin

Dinamika penduduk dapat dilihat dari perubahan struktur dan komposisinya menurut umur dan jenis kelamin. Proyeksi penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebesar 128.783 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan disajikan melalui angka rasio jenis kelamin (sex ratio). Sex Ratio penduduk Kota Bukittinggi sebesar 94%. Artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 94 penduduk laki-laki. Angka sex ratio yang lebih kecil dari 100 ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki.

Distribusi penduduk Kota Bukittinggi menurut jenis kelamin tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN	RASIO JENIS KELAMIN
1	0 – 4	6395	6251	12646	102,3
2	5 – 9	6000	5920	11920	101,35
3	10 – 14	5256	5192	10448	101,23
4	15 – 19	6047	7443	13490	81,24
5	20 – 24	5947	7928	13875	75,01
6	25 – 29	5264	5259	10523	100,1
7	30 – 34	4875	4742	9617	102,8
8	35 – 39	4442	4435	8877	100,16
9	40 – 44	4140	4246	8386	97,5
10	45 – 49	3835	3655	7490	104,92
11	50 – 54	3069	2968	6037	103,4
12	55 – 59	2545	2674	5219	95,18
13	60 – 64	1974	2037	4011	96,91
14	65 – 69	1264	1370	2634	92,26
15	70 – 74	707	914	1621	77,35
16	75+	724	1265	1989	57,23
JUMLAH		62.484	66.299	128.792	94
ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY RATIO)					47,14

Sumber: BPS Kota Bukittinggi.

Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yaitu 66.299 jiwa berbanding 62.484 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 94 yang artinya dari 100 orang penduduk perempuan terdapat 94 orang laki-laki.

B. Penyebaran Penduduk

Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat di pelajari dengan menggunakan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk.

Tabel 3.2. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jml Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1	GP	6.831	49.699	7.28
2	MKS	12.156	48.862	4,020
3	ABTB	6.252	30.222	4.830
Jumlah		25.239	128.783	5,100

Sumber: BPS Kota Bukittinggi.

Penyebaran penduduk Kota Bukittinggi paling banyak adalah di kecamatan Guguk Panjang yaitu 49,699 jiwa (38,59%) dan paling sedikit di kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh yaitu 30.222 jiwa (23,47%).

Namun Kecamatan dengan tingkat kepadatan yang paling tinggi yaitu kecamatan Guguk Panjang yaitu 7,280 jiwa per km², diikuti oleh kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 4.830 jiwa per km² dan kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebanyak 4.020 jiwa per km².

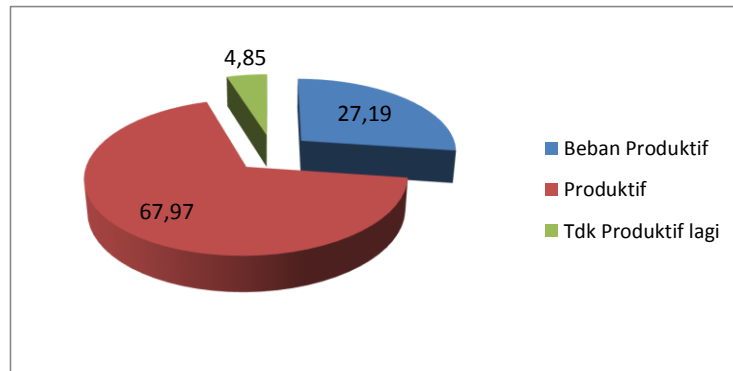
Ditinjau dari penyebaran penduduk berdasarkan luas daerah, kepadatan penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2018 sudah tergolong sangat padat, yaitu 5.100 jiwa per km². Berarti tiap km² terhuni oleh penduduk sebanyak 5.100 jiwa. Penyebaran penduduk pada tahun 2018 meningkat sekitar 76 jiwa dibandingkan dengan penyebaran penduduk pada tahun 2017 sebesar 5.024 per km².

Berdasarkan klasifikasi kepadatan penduduk menurut kabupaten dan kota menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Kota Bukittinggi termasuk klasifikasi sangat padat dan merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi dibandingkan dengan 18 kabupaten/kota lain di Propinsi Sumatera Barat. Kepadatan penduduk kota Bukittinggi yang demikian disebabkan salah satunya karena wilayah Kota Bukittinggi sendiri hanya mencakup 0.06% saja dari total luas Propinsi Sumatera Barat disamping berkembangnya kota Bukittinggi sebagai kota wisata dan kota pendidikan di Sumatera Barat.

C. Penduduk Produktif

Komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu produktif (15- 64 tahun), belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas).

Gambar 3.1. Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur Produktif di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

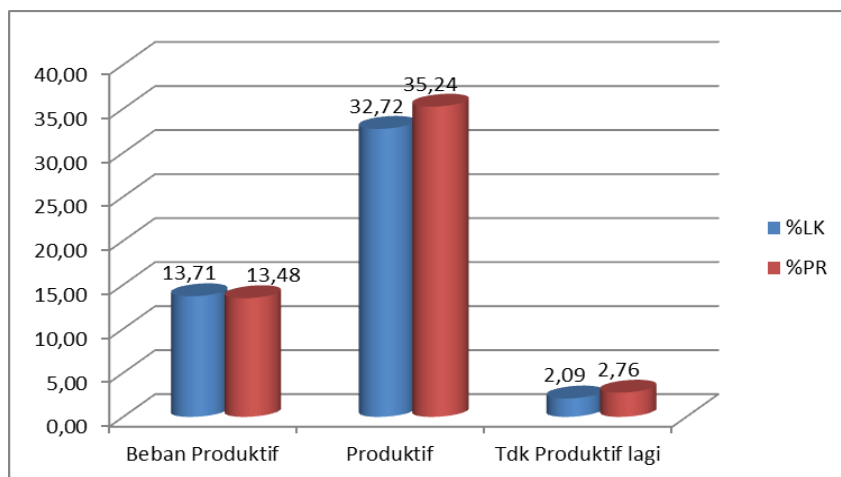


Sumber: BPS Kota Bukittinggi Tahun 2018.

Gambar 3.1. menunjukkan bahwa 27,19% penduduk Kota Bukittinggi adalah merupakan beban produktif, 68% penduduk berusia produktif, dan 4,85% penduduk berusiatidak produktif lagi.

Bila dilihat secara gender, akan terlihat bahwa penduduk berjenis kelamin perempuan yang produktif lebih banyak dari pada laki-laki seperti gambar 3.2 dibawah ini.

Gambar 3.2. Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur Produktif dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2018.



Sumber: BPS Kota Bukittinggi Tahun 2018

Angka ketergantungan (dependency ratio) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin rendah angka dependency ratio maka peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi. Rendahnya angka ketergantungan menunjukkan tingginya proporsi penduduk usia produktif relative terhadap penduduk usia belum/ tidak produktif. Sehingga secara ekonomi akan semakin besar peluang untuk menghasilkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin rendahnya dependency ratio juga menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi sehingga nilai tambah perkapita akan semakin tinggi, hal ini berarti peningkatan kesejahteraan penduduk.

Dependensi ratio Kota Bukittinggi adalah 47,14 yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 47 orang penduduk usia tidak produktif.

Bila dilihat berdasarkan gender, maka penduduk perempuan yang produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang produktif. Seperti digambarkan pada gambar 3.3 berikut.

Gambar 3.3. Perbandingan Penduduk Produktif berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2018.



Sumber: BPS Kota Bukittinggi Tahun 2018.

Jika dilihat berdasarkan kelompok usia, pada usia muda angka ketergantungan penduduk laki-laki lebih besar dari pada perempuan, sedangkan

pada usia tua, angka ketergantungan perempuan lebih besar dari pada laki-laki. Hal ini berhubungan dengan rasio jenis kelamin, dimana pada usia muda rasio jenis kelamin di atas angka 100, sedangkan pada usia tua rasio jenis kelamin berada dibawah angka 100. Tingginya angka ketergantungan perempuan pada usia tua akan berdampak pada social ekonomi, yang dibutuhkan pada usia tua, jaminan sosial, fasilitas kesehatan, serta fasilitas sosial ekonomi lainnya untuk lansia harus diprioritaskan pada perempuan.

Jumlah golongan penduduk usia tua (75+) juga cukup besar, terutama perempuan. Hal ini dapat dimaknai dengan semakin tingginya usia harapan hidup, terutama perempuan. Kondisi ini menuntut kebijakan terhadap penduduk usia tua. Bertambahnya jumlah penduduk tua dapat dimaknai sebagai meningkatnya tingkat kesejahteraan, meningkatnya kondisi kesehatan tetapi juga dapat dimaknai sebagai beban karena kelompok usia tua ini sudah tidak produktif lagi.

D. Komposisi Penduduk Menurut Wajib KTP

Seluruh penduduk yang telah berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki identitas kewarganegaraan atau yang dikenal dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti dari yang diterbitkan oleh Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tahun 2018 di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa 97,1 % penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP Elektronik, dimana penduduk laki-laki sebesar 49,27% (40.594 orang) dan penduduk perempuan sebesar 50,7% (41.794 orang). Hal ini menunjukkan lebih tingginya partisipasi perempuan dalam pengurusan KTP.

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Yang Wajib Memiliki KTP dan Telah Memiliki KTP Elektronik Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No.	Kec.	Wajib KTP			KTP Elektronik		
		Laki-laki	Perempuan	Jml	Laki-laki	Perempuan	Jml
1	MKS	17.873	18.071	35.944	17.299	17.592	34.891
2	GP	15.122	15.511	30.633	14.598	15.066	29.664
3	ABTB	8.939	9.329	18.268	8.697	9.136	17.833
Jumlah		41.934	42.911	84.845	40.594	41.794	82.388

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bukittinggi Tahun 2018

Bila dilihat perkembangan kepemilikan KTP Elektronik dari tahun 2018 telah mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 yaitu dari 94% meningkat menjadi 97,1% ditahun 2018.

E. Kepemilikan Akte Kelahiran untuk Anak

Hak Sipil anak adalah hak asasi yang melekat pada pribadi seseorang (anak) sebagai seorang individu unik ditengah masyarakat sehingga ia bisa mengembangkan kemampuan dan kepribadiannya secara leluasa termasuk hak identitas anak. Sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 5, yaitu “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” dan pasal 27 ayat 1 yaitu “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya,” ayat 2 identitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran. Lebih lanjut Akte Kelahiran tersebut merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap warga negaranya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 juga mengatur bahwa untuk memiliki akta kelahiran tidak dikenakan biaya (gratis), namun masih ada anak yang belum mempunyai akte kelahiran dengan berbagai alasan.

Dari penduduk usia 0-18 tahun, yang telah memiliki akte kelahiran di Kota Bukittinggi sekitar 92%, sedangkan perempuan yang memiliki akte kelahiran adalah sebanyak 92,5%, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4. Presentase Anak Usia 0-18 tahun yang Memiliki Akte Kelahiran menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

Tabel PEMILIKAN AKTE KELAHIRAN PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN DI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

No.	Kec.	JML PENDUDUK 0-18 TH			AKTE KELAHIRAN		
		Laki-laki	Perempuan	Jml	Laki-laki	Perempuan	Jml
1	GP	7.446	6.969	14.415	6.886	6.448	13.334
2	MKS	8.881	8.383	17.264	8.133	7.743	15.876
3	ABTB	4.728	4.348	9.076	4.342	4.029	8.371
Jumlah		21.055	19.700	40.755	19.361	18.220	37.581

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bukittinggi Tahun 2019

F. Komposisi Penduduk menurut Status Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara tidak langsung status perkawinan akan mempengaruhi tingkat kelahiran. Umumnya suatu daerah dengan proporsi kawin yang tinggi cenderung menaikkan angka kelahiran.

Tabel 3.5. Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas menurut Status Perkawinan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No.	Status Perkawinan	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	L+P (%)
1	Belum Kawin	41,33	36.76	38.95
2	Kawin	56.65	52.5	54.5
3	Cerai Hidup	0.47	2.85	1.7
4	Cerai Mati	1.55	7.89	4.85
Jumlah		100	100	100

Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2018

G. Kepala Keluarga Perempuan

Kepala Keluarga tidak hanya berjenis kelamin laki-laki saja tetapi perempuan pun ada yang berperan sebagai kepala keluarga. Peran kepala keluarga sangatlah besar dalam mengambil keputusan dalam sebuah keluarga, seperti memilihkan pendidikan untuk anak-anak, menjaga kesehatan keluarga, sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan suatu daerah.

Di bawah ini memperlihatkan persentase Kepala rumah tangga menurut jenis kelamin tahun 2018.

Tabel 3.6. Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi tahun 2018.

No	Nama Kota	Persentase Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga (KRT)		
		Laki-laki (%)	Perempuan (%)	L + P (%)
1.	Bukittinggi	42,95	11,87	26.95

Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2018

Tabel di atas menggambarkan bahwa terdapat 11,87 % kepala keluarga di Kota Bukittinggi adalah perempuan, hal ini berarti perempuan haruslah memiliki kemampuan baik secara ekonomi, moral dan spiritual untuk menjadi pengambil keputusan di rumah tangganya.

BAB IV

GENDER DAN ANAK BIDANG PENDIDIKAN

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan formal dititikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi. Demikian juga peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, khususna bagi perempuan dan anak. Sementara pendidikan non formal bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam mencapai program wajib belajar 9 tahun.

Indikator pendidikan seperti angka melek huruf, status pendidikan ,rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Semakn tinggi pendidikan dan rata-rata sekolah bagi perempuan akan berdampak kepada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam embangunan dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas yang baik tanpa membedakan anak laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdaya gunakan. Tanpa mengenyampingkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas.

Bagaimana peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan telah diakses oleh perempuan akan diulas pada bab ini. Data dan informasi yang dihasilkan

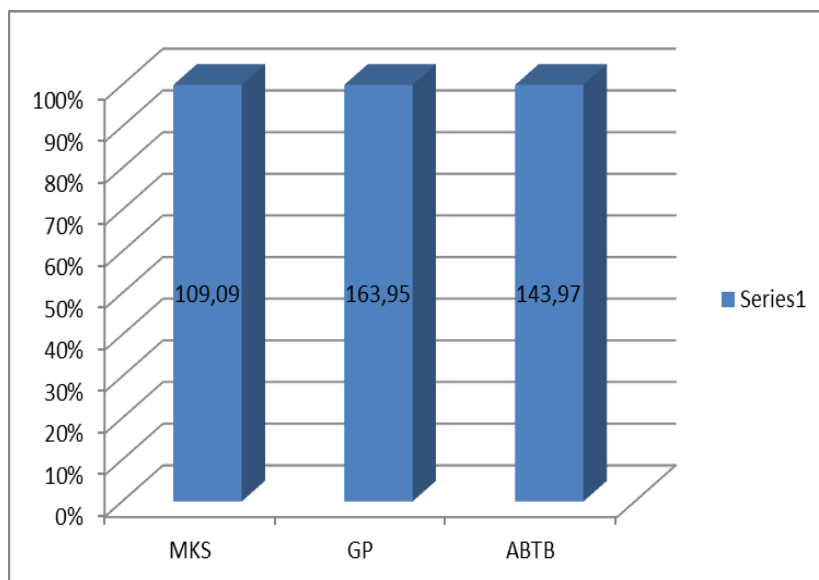
diharapkan akan dapat mengidentifikasi sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu pengambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

A. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut,

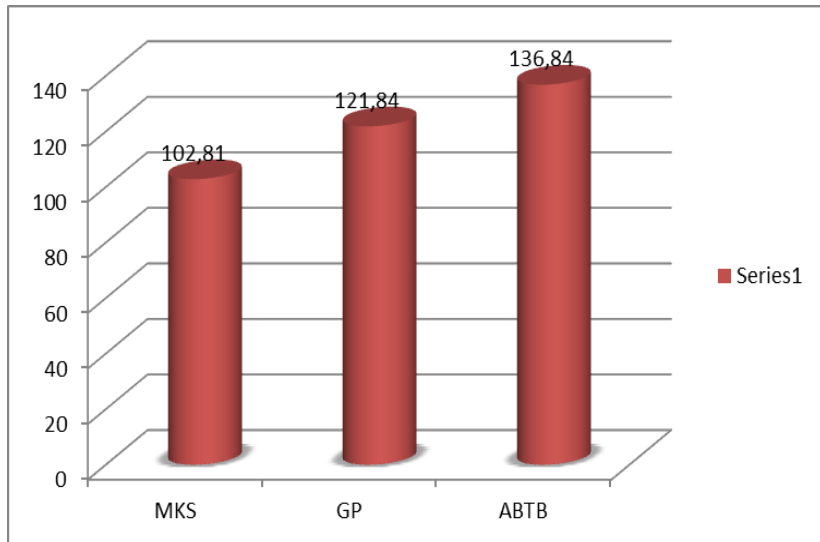
Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan.

Gambar 4.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SD Laki-laki Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018



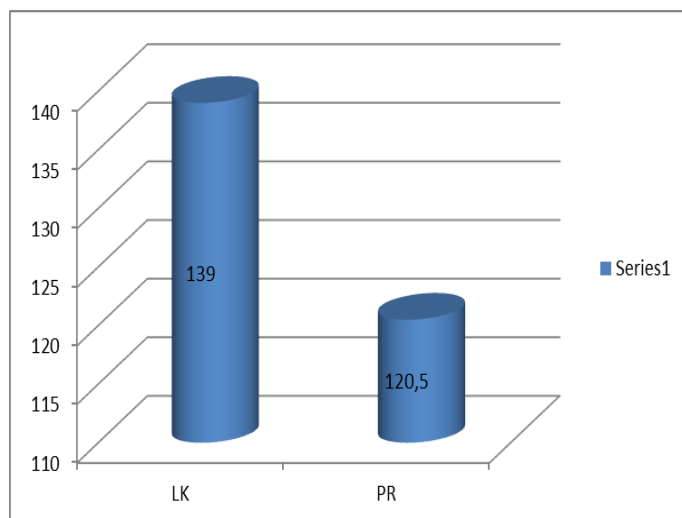
Sumber: Disdikbud Kota Bukittinggi Tahun 2018

Gambar 4.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SD Perempuan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018



Sumber: Disdikbud Kota Bukittinggi Tahun 2018

Gambar 4.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SD menurut jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2018



Sumber: Disdikbud Kota Bukittinggi Tahun 2018

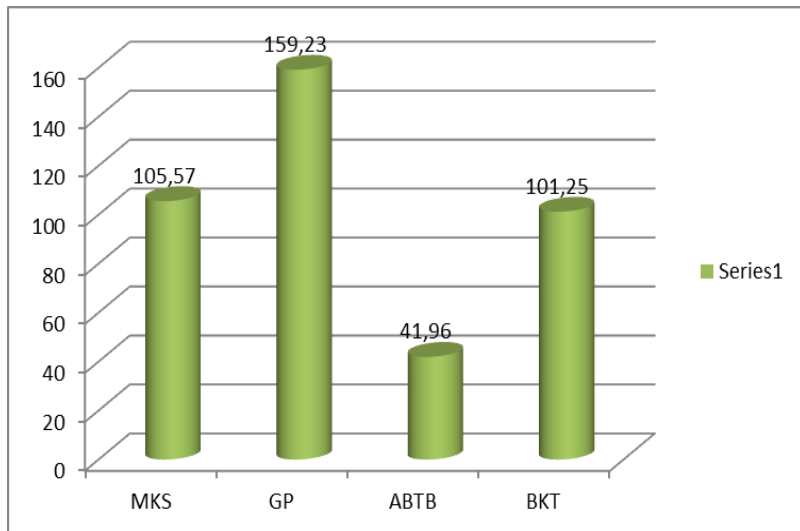
Dari gambar di atas terlihat bahwa APK siswa SD laki-laki maupun perempuan sudah melebihi nilai 100%, yaitu 139 % pada laki-laki dan 120,5% pada

perempuan. Hal ini mengindikasikan populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar mencakup anak diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibandingkan usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah diusia yang lebih muda. Faktor lain yang menyebabkan APK melebihi 100% adalah adanya siswa yang berasal dari luar Kota Bukittinggi yang bersekolah di Bukittinggi.

Bila kita bandingkan antara ketiga kecamatan, terlihat perbedaan menyolok di Kecamatan Guguk Panjang antara APK laki- laki dan APK Perempuan.

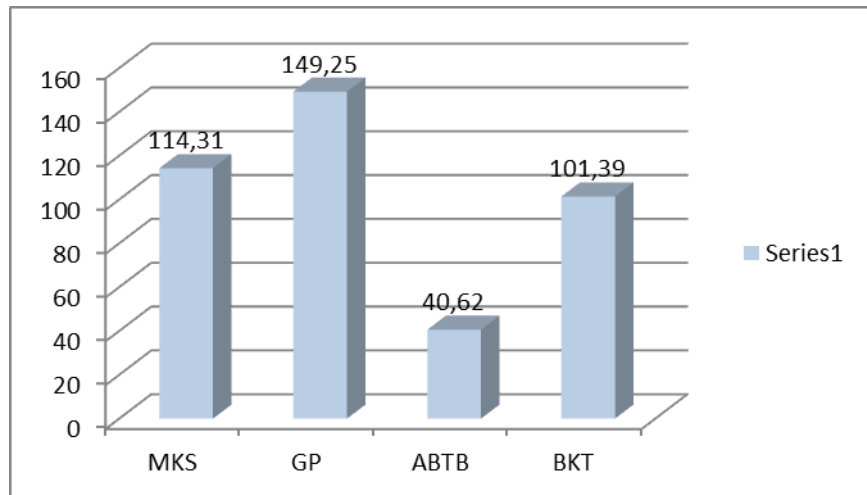
Pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, APK perempuan dan APK laki- laki pada pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.4. Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SLTP Laki-Laki Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.



Sumber: Disdikbud Kota Bukittinggi Tahun 2018

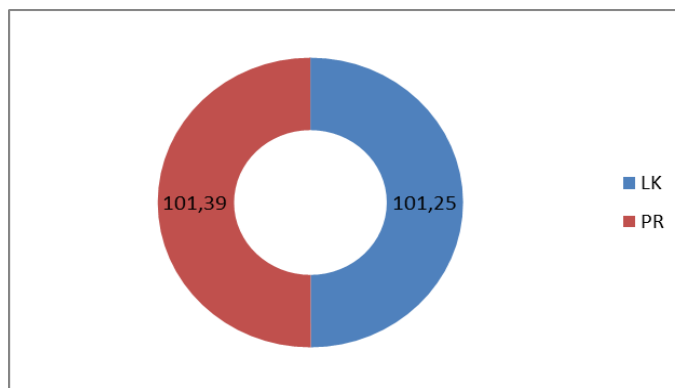
Gambar 4.5. Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SLTP Perempuan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.



Sumber : Disdikbud Kota Bukittinggi Tahun 2018.

Pada kedua grafi diatas terlihat bahwa APK siswa SLTP baik llaki-laki maupun perempuan masih rendah di Kecamatan ABTB, hal ini disebabkan sarana sekolah SLTP di Kecamatan ABTB hanya tersedia 2 sekolah, angka ini relatif kkecil dibanding 2 kecamatan lainnya , yang memiliki SLTP 10 sekolah di Kecamatan Guguk Panjang dan 7 sekolah di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

Gambar 4.6. APK Siswa SLTP menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2018.



Sumber: Disdikbud Kota Bukittinggi Tahun 2018.

Pada gambar di atas terlihat terlihat bahwa APK siswa SLTP Laki-laki dan perempuan lebih dari 100%, akan tetapi terlihat perbedaan bahwa APK siswa SLTP perempuan sedikit lebih besar dari pada siswa laki-laki.

Salah satu penyebab tingginya APK tingkat jenjang pendidikan SLTP di Kota Bukittinggi adalah karena peminatan dan daya tampung pendidikan jenjang SLTP di Kota Bukittinggi lebih besar, sebab Bukittinggi merupakan kota pendidikan yang memiliki fasilitas pendidikan dan mutu yang cukup baik di Sumatera Barat.

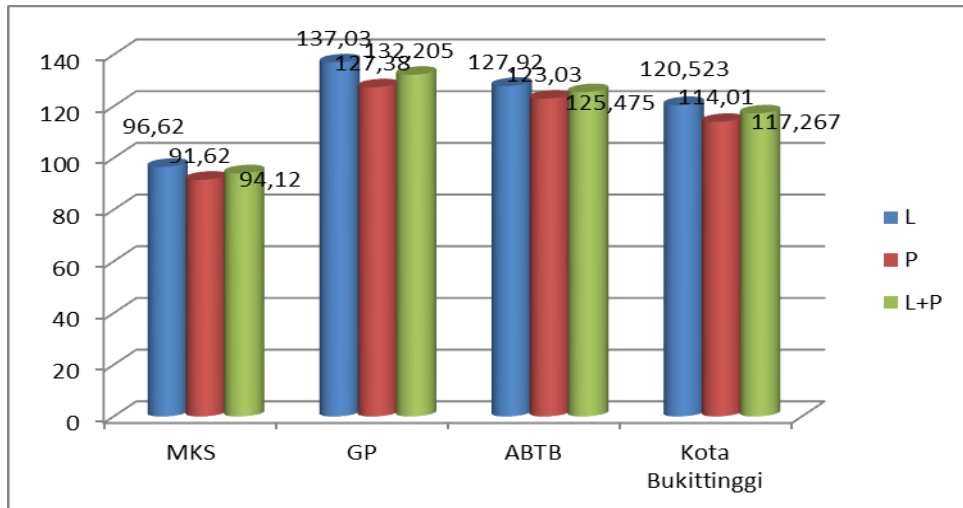
B. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu (7 sampai dengan 18 tahun) yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Gambar berikut menunjukkan Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan SD dan SLTP dan jenis kelamin per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018

Gambar 4.7. Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan SD dan Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.



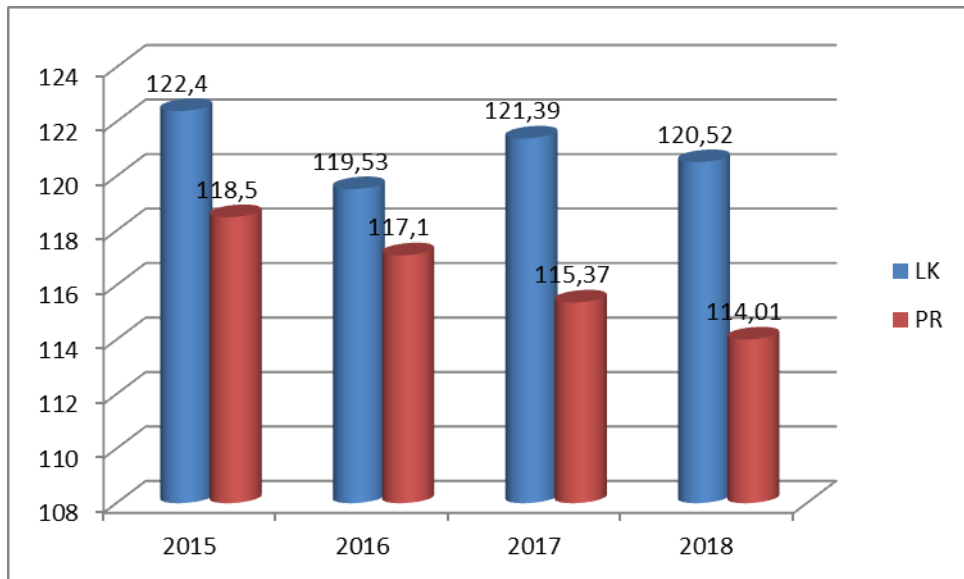
Sumber : Disdikbud Kota Bukittinggi Tahun 2019

Pada gambar diatas terlihat bahwa APM terendah pada jenjang pendidikan SD adalah pada kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Sedangkan dua kecamatan lainnya sudah melebihi 100 %. Hal ini menggambarkan bahwa pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan masih terdapat anak yang sekolah tidak tepat waktu, terlalu cepat atau terlalu lambat masuk SD..

Bila dibandingkan antara laki-laki dan perempuan ternyata APM laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan.

Jika dilihat dari perkembangan APM siswa SD dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 , terlihat penurunan APM siswa SD perempuan dari 118,5 tahun 2015 menurun menjadi 117,1 tahun 2016 ,turun menjadi 115,37 tahun 2017, dan tahun 2018 turun lagi menjadi 114,52 ,sedangkan APM siswa SD laki-laki menurun dari 122,4 tahun 2015, menurun menjadi 119,53 tahun 2016 meningkat menjadi 121,39 tahun 2017 dan turun lagi menjadi 120,52 seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

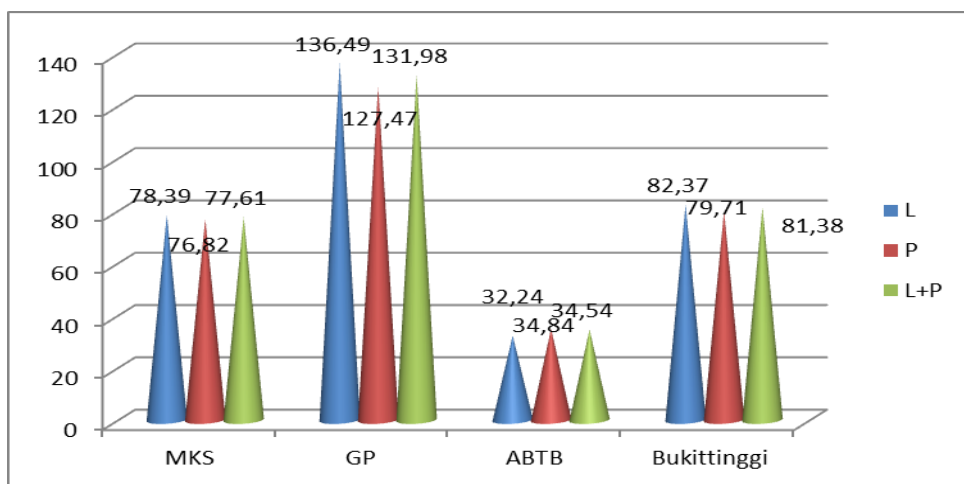
Gambar 4.8 Perbandingan APM siswa SD Tahun 2015 sd 2018 berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bukittinggi



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019

Untuk Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan SLTP dan jenis kelamin per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.9 Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan SLTP dan Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018



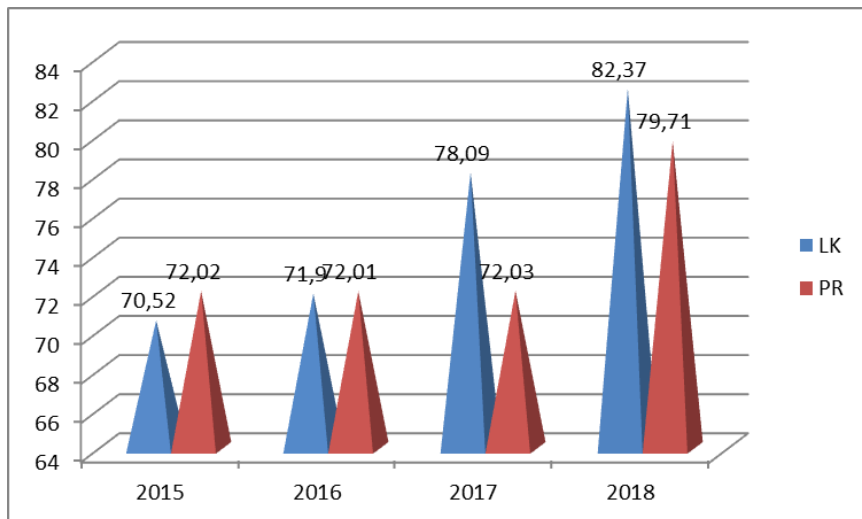
Sumber: Disdikbud Kota Bukittinggi Tahun 2019

APM pada jenjang pendidikan SLTP hanya Gugguk Panjang yang sudah mencapai 100%, bahkan sudah 131 %., sedangkan kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh merupakan kecamatan yang APM pada jenjang pendidikan SLTP yang paling rendah yaitu 34,54. Artinya hanya sepertiga anak usia sekolah pada jenjang pendidikan SLTP yang sekolah SLTP tepat waktu.

Jika dibandingkan APM berdasarkan jenis kelamin pada siswa SLTP terlihat bahwa APM pada siswa laki-laki lebih tinggi dari pada APM siswa perempuan kecuali pada kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, terlihat perempuan lebih tinggi dari pada APM laki-lakinya.

Perkembangan APM siswa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.10. Perbandingan APM Siswa SLTP Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2019

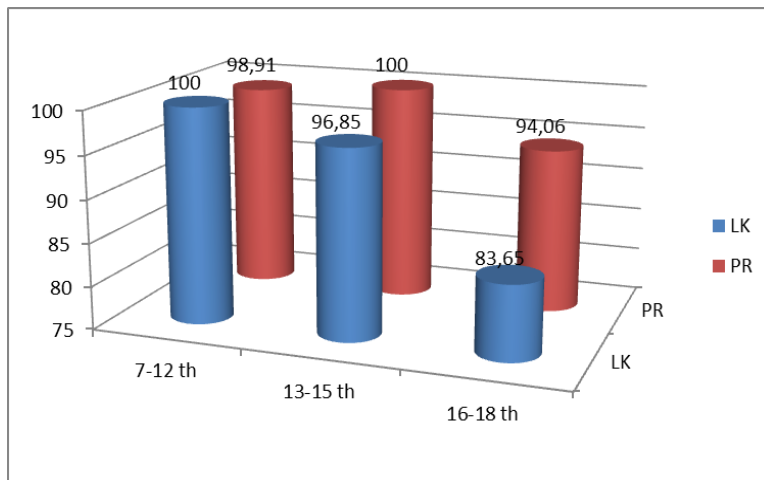
Dari gambar di atas terlihat bahwa APM siswa SLTP terjadi peningkatan, terutama APM siswa perempuan meningkat jauh pada tahun 2018. Hal ini disebabkan telah terjadinya peningkatan Perempuan hampir sama disetiap tahunnya, akan tetapi terjadi peningkatan kesadaran masyarakat bahwa pendidikan sesuai dengan usianya..

C. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Naum demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Di bawah ini digambarkan Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun) dan Jenis kelamin per kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2018.

Gambar 4.11. Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur (7-12,13-15 dan 16-18 tahun) dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi tahun 2018.



Tabel di atas, memperlihatkan bahwa perempuan memiliki APS lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang berarti kesempatan perempuan untuk mengakses pendidikan telah menambah angka partisipasi wanita dalam pendidikan. Konsekuensinya terhadap perencanaan pembangunan yang harus dilakukan pemerintah adalah menyediakan lapangan kerja bagi penduduk perempuan.

Persentase Penduduk Usia 5 tahun keatas menurut jenis kelamin dan partisipasi Sekolah di Kota Bukittinggi Tahun 2018 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 4.1. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Kota Bukittinggi Tahun 2018

No	Partisipasi Pendidikan	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	L+P (%)
1	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	4,3	4,41	4,36
2	Masih Sekolah	27,41	30,52	29,02
3	Tidak bersekolah lagi	68,3	65,07	66,63
	Total	100	100	100

Sumber : Susenas BPS Kota Bukittinggi Tahun 2018.

Secara umum penduduk di Kota Bukittinggi telah menikmati pendidikan, hanya 4,36 % penduduk Bukittinggi yang tidak/belum pernah sekolah, sedangkan penduduk yang masih sekolah terdapat sedikit perbedaan, yang dapat diindikasikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sudah dapat kesempatan menikmati fasilitas pendidikan.

D. Melek Huruf dan Buta Huruf

Melek Huruf didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan menulis. Indikator ini menggambarkan mutu sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik mutu sumber daya manusia dalam masyarakat. Kemampuan membaca dan menulis (baca tulis) merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan penduduk untuk menuju hidup sejahtera.

Persentase penduduk Kota Bukittinggi berumur 19 tahun ke atas yang melek huruf menurut jenis kelamin tahun 2018 adalah sebesar 99,88 % , yang artinya hanya 0,12 % yang masih buta huruf. Hal ini menunjukkan pencapaian pendidikan dasar yang efektif dan berhasilnya program keaksaraan.

E. Angka Putus Sekolah

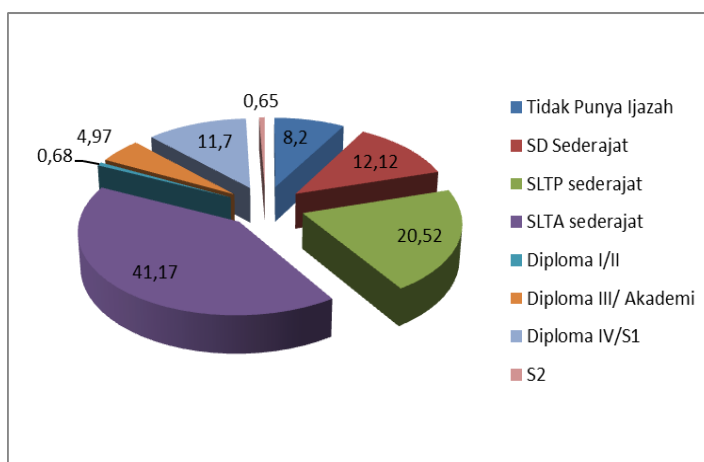
Angka Putus Sekolah di Bukittinggi pada tahun 2018 adalah sebanyak 11,3 %, Berdasarkan data dari UNICEF, faktor ekonomi adalah alasan utama siswa putus sekolah. Anak-anak dari 20 persen keluarga termiskin hampir lima kali lebih mungkin untuk tidak masuk SD dan SMP, dibandingkan 20 persen dari keluarga terkaya. UNICEF mengungkapkan bahwa status ekonomi keluarga, memiliki dampak yang paling signifikan pada kehadiran anak-anak usia sekolah dasar dan menengah pertama. Oleh sebab itu penurunan angka kemiskinan harus menjadi prioritas dalam pembangunan khususnya di Bukittinggi.

F. Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi

Gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan akan semakin baik kualitas penduduknya sehingga dapat menggambarkan tingkat kemajuan suatu negara.

Bila dilihat perbandingan persentasenya maka terlihat bahwa pendidikan SLTA sederajat merupakan persentase tertinggi yang telah ditamatkan oleh penduduk umur 15 tahun keatas, seperti terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.12. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki di Kota Bukittinggi Tahun 2018



Sumber: Susenas BPS Kota Bukittinggi Tahun 2018.

G. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk Bukittinggi adalah 10,98 tahun, Ini berarti penduduk Bukittinggi sudah menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tertinggi yang dimiliki seseorang merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formalnya. Semakin tinggi ijazah yang dimiliki rata-rata penduduk suatu negara semakin tinggi taraf intelektualitas negara tersebut.

Keberhasilan program pembangunan pendidikan dapat dilihat dari pendidikan yang ditamatkan sebagian besar penduduk. Berdasarkan data susenas pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas adalah SLTA ke bawah dengan presentase mencapai 82,01 %.

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki di Kota Bukittinggi Tahun 2018

Tabel 4. 2 Persentase Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2018

No.	Pendidikan Tertinggi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1	Tidak Punya Ijazah	8,25	8,16	8,2
2	SD Sederajat	13,06	11,25	12,12
3	SLTP sederajat	20,66	20,38	20,52
4	SLTA sederajat	41,33	41,03	41,17
5	Diploma I/II	0,29	1,04	0,68
6	Diploma III/ Akademi	3,94	5,91	4,97
7	Diploma IV/S1	12,39	11,07	11,7
8	S2	0,08	1,17	0,65
9	S3	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas BPS Kota Bukittinggi.

Jika dibandingkan antara laki-laki dan perempuan terlihat bahwa pendidikan laki-laki relatif lebih baik dibandingkan dengan pendidikan perempuan pada jenjang pendidikan SLTA ke bawah, Sedangkan untuk pendidikan DIII/Akademi dan S1/Diploma IV lebih banyak pada perempuan.

H. Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru ini dilakukan dengan tujuan untuk pemetaan kompetensi, sebagai dasar kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mana sebagai bagian dari proses penilaian kinerja agar mendapatkan gambaran yang utuh terhadap pelaksanaan semua standar kompetensi.

Tabel 4.3 Jumlah guru yang telah menerima sertifikasi guru menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

NO.	KECAMATAN	GURU SD			GURU SLTP			TOTAL
		L	P	L + P	L	P	L + P	
1	MKS	31	146	177	5	36	41	218
2	GP	46	211	257	28	157	185	442
3	ABTB	27	134	161	2	23	25	186
	JUMLAH	104	491	595	35	216	251	846

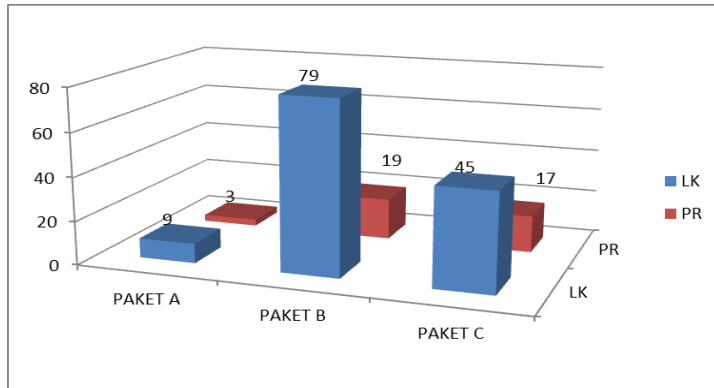
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bukittinggi Tahun 2019

Gambar di atas memperlihatkan bahwa guru sertifikasi banyak diterima oleh guru SD, apabila dibandingkan dengan data guru yang ada di Kota Bukittinggi, maka penerima sertifikasi lebih banyak perempuan karena jumlah guru perempuan lebih banyak dari laki-laki.

Pendapatan perempuan dari sertifikasi menyebabkan kaum perempuan yang berprofesi guru memiliki kemampuan finansial lebih dari pada suami, hal ini bila diamati berpengaruh terhadap kehidupan sosial guru bahkan kepada keutuhan rumah tangganya. Hal ini akan dibahas pada kasus perceraian pada bab tertentu.

I. Angka Kelulusan Paket A, B dan C

Gambar 4.13. Jumlah Angka Kelulusan Paket A, B dan C berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2018.



Sumber: Disdikbud Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Grafik 4.13. di atas menggambarkan bahwa laki-laki lebih banyak yang lulus pada Paket A dan Paket B Paket dari pada perempuan.

J. Sekolah Luar Biasa (SLB)

Tabel 4.4. Jumlah SLB Negeri dan Swasta Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No	Kec.	SLB Negeri					SLB Swasta				
		TK	SD	SLTP	SLTA	Jml	TK	SD	SLTP	SLTA	Jml
1	MKS	0	1	0	0	1	0	3	1	0	4
2	G.P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ABTB	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Jumlah						1					6

Sumber: Disdikbud Kota Bukittinggi Tahun 2019.

K. Akses terhadap Informasi dan Teknologi

Tabel 4.5 Persentase anggota Rumah Tangga usia 5 tahun keatas menurut Jenis Kelamin memiliki/ menggunakan Teknologi Informasi 3 bulan terakhir Tahun 2018

Jenis Kelamin	Memiliki telpon seluler (HP) / Nirkabel	Memiliki telpon seluler (HP) / Nirkabel atau komputer (PC/Desktop/Laptop, Notebook, tablet)	Mengakses Internet
Laki-laki	80,02	87,49	60,16
Perempuan	79,54	88,59	58,6
Rata-rata	79,78	88,04	59,38

Dari tabel 4.5 diatas terlihat bahwa penggunaan telpon seluler (HP)/ Nirkabel atau komputer (PC/Desktop/Laptop, Notebook, tablet) sudah mencapai 88,04 %, yang berarti sistem komunikasi dan informasi serta teknologi sudah semakin mudah dan semakin cepat terakses oleh masyarakat.

Akses terhadap internet juga sudah dipergunakan oleh 59,38% masyarakat, hal ini berdampak positif dan negatif bagi masyarakat, terutama pada generasi muda . Dampak positif yang terjadi adalah semakin mudahnya masyarakat untuk menambah pengetahuan, mudahnya komunikasi, mempermudah dunia bisnis sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Dampak negatif penggunaan internet ini adalah semakin mudahnya anak dibawah umur mengakses tontonan yang berbau pornografi serta games on line yang menyebabkan anak menjadi kecanduan terhadap tontonan ini.

BAB V

GENDER DAN ANAK BIDANG KESEHATAN

Pembangunan Kesehatan merupakan salah satu dari upaya pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan perempuan dan anak melalui pelayanan kesehatan yang bermutu dan menjangkau setiap lapisan masyarakat. Pembangunan kesehatan diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tingginya disparitas dan perlunya percepatan peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan menuntut adanya dukungan sumber daya yang cukup serta arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat. Dukungan data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat, dan cepat dalam pengelolaan pembangunan kesehatan menjadi penting.

Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional, maka pembangunan di Kota Bukittinggi khususnya pembangunan kesehatan telah diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Terkait dengan itu, pelayanan kesehatan perempuan dan anak-anak dapat dilihat dari beberapa layanan yang diberikan, diantaranya layanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan, layanan kesehatan terhadap pengidap HIV/AIDS, pelayanan keluarga berencana dan sebagainya.

A. Angka Harapan Hidup

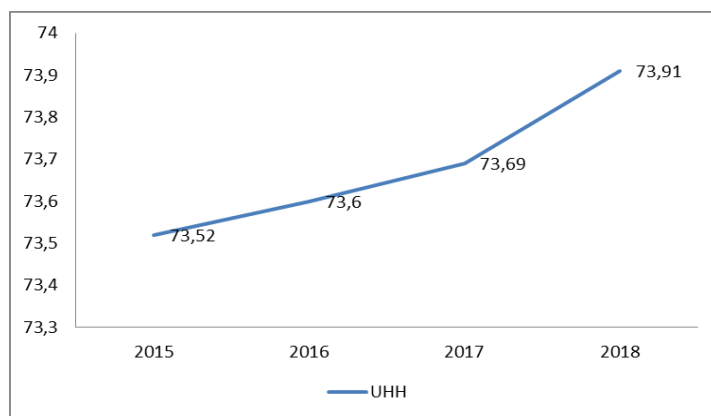
Umur Harapan Hidup warga Bukittinggi selalu mengalami peningkatan hal ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Penghitungan angka harapan hidup dengan menghitung rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Hal ini dikarenakan Indonesia belum memiliki sistem pendataan kematian berdasarkan kelompok umur.

"Jadi angka harapan hidup berhubungan erat dengan angka kematian bayi.

Jika angka kematian bayi tinggi, maka angka harapan hidupnya akan rendah. Begitu juga sebaliknya, angka kematian bayi rendah, angka harapan hidup tinggi.

Gambar dibawah ini menunjukkan peningkatan Umur harapan Hidup Bukittinggi dari tahun 2015 samapai dengan tahun 2018.

Gambar 5.1 Umur harapan Hidup Bukittinggi dari tahun 2015 samapai dengan tahun 2018.



B. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Angka kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Kematian ibu adalah kematian seorang wanita yang dikarenakan oleh kehamilan, persalinan, dan masa nifasnya. Angka kematian Ibu mencerminkan resiko yang dihadapi ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh

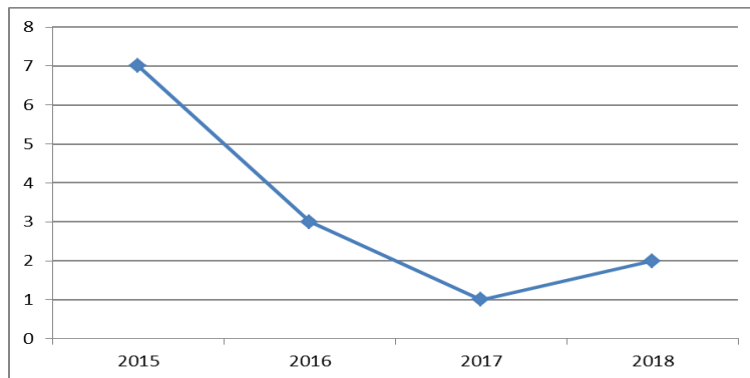
- Keadaan sosial ekonomi dan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan.
- Kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran.

- c. Tingkat tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri.

AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan.

Pada Gambar 5.1 berikut terlihat kecenderungan jumlah kematian ibu maternal sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 di Kota Bukittinggi.

Gambar 5.2. Jumlah Kematian Ibu di Kota Bukittinggi Tahun 2015-2018.



Sumber: Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Jumlah kematian ibu maternal di Kota Bukittinggi tahun 2018 adalah 2 jiwa. Kasus ini terjadi di wilayah Kecamatan Guguk Panjang. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu dari 1 kasus menjadi 2 kasus,

1. Penyebab Kematian Ibu Melahirkan

Dari 2 kasus kematian Ibu melahirkan pada tahun 2018, penyebabnya adalah :

Tabel 5.1 Penyebab kematian Ibu melahirkan Tahun 2018

NO.	KECAMATAN	PENYEBAB KEMATIAN IBU KARENA HAMIL, MELAHIRKAN DAN NIFAS							
		EKLAMISIA	INFEKSI	ABORTUS	LAMBA/MACE	EMBO LI OBSTETRI	KOMPL MASA PUEPU REUM	PERDARAN	Lain-lain
1	MKS	0	0	0	0	0	0	0	0
2	GP	0	0	0	0	0	0	1	1
3	ABTB	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	1	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2019

Penyebab kematian ibu adalah Inverio Uteri dan HPP ec Atonia Uteri.

Selain menegakkan AMP di tingkat kota, seperti halnya kematian bayi, peran promosi kesehatan melalui program P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) serta program Desa Siaga dalam menjalankan fungsinya meningkatkan sistem siaga di masyarakat terhadap kesehatan ibu hamil di wilayahnya menjadi upaya dalam menurunkan kematian ibu. Selain itu, bidang promosi kesehatan sebagai fungsi promotif dan preventif melalui penyuluhan dengan menggunakan media media yang efektif dan menarik dapat meningkatkan pengetahuan kesehatan ibu dan anak.

2. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) dengan Kompetensi Kebidanan

Periode persalinan merupakan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap Angka Kematian Ibu di Indonesia. Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa sekitar persalinan, hal ini disebabkan antara lain pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional).

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan yang bertujuan untuk mengamankan proses persalinan oleh tenaga kesehatan.

Tabel 5.2. Cakupan Persalinan Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No	Kecamatan	Linakes		
		Sasaran	Absolut	%
1	MKS	1090	1.046	95,96
2	GP	1022	899	87,96
3	ABTB	596	512	85,90
Jumlah		2708	2.457	90,73

Sumber: Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2019.

3. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Antenatal Care)

Hasil pencapaian upaya kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator Cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.

Sedangkan Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Cakupan pelayanan ante natal (K1 dan K4) di Kota Bukittinggi tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.3. Cakupan Pelayanan Antenatal Care Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No	Kecamatan	Sasaran	K1		K4		Bumil Resti	
			Jml	%	Jml	%	Jml	Dapat Yankes
1	MKS	1142	1112	97.37	1067	93,43	262	262
2	GP	1071	98	92.16	992	92,62	187	187
3	ABTB	625	572	91.52	554	88,64	58	58
Jumlah		2.843	1782	94.12	2613	92,07	507	507

Sumber: Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Dari tabel di atas terlihat bahwa seluruh ibu hamil di wilayah Kota Bukittinggi 94,12% sudah mendapatkan pelayanan Antenatal Care pertama kali, sedangkan persentase ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan hanya 92,07%.

4. Immunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil

Immunisasi Tetanus Toxoid adalah proses untuk membangun kekebalan sebagai upaya pencegahan terhadap infeksi tetanus. Vaksin Tetanus yaitu toksin kuman tetanus yang telah dilemahkan dan kemudian dimurnikan.

Manfaat Imunisasi TT Ibu Hamil

1. Melindungi [bayi baru lahir](#) dari tetanus neonatorum. Tetanus neonatorum adalah penyakit tetanus yang terjadi pada [neonatus](#) (bayi berusia kurang 1 bulan) yang disebabkan oleh *clostridium tetani*, yaitu kuman yang mengeluarkan toksin (racun) dan menyerang sistem saraf pusat.
2. Melindungi ibu terhadap kemungkinan tetanus apabila terluka

Tabel. 5.4 Cakupan Immunisasi TT pada Bumil Per Kecamatan Kota Bukittinggi tahun 2018

No	Kecamatan	Sasaran	IMUNISASI TETANUS TOKSOID PADA IBU HAMIL											
			TT-1		TT-2		TT-3		TT-4		TT-5		TT2+	
			Jml	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1	Mandiingin Koto Selayan	1142	167	14.62	238	20.84	259	22.68	221	19.35	185	16.20	903	79.07
2	Guguk Panjang	1071	98	9.15	84	7.84	133	12.42	179	16.71	238	22.22	634	59.20
3	Aur Birugo Tigo Baleh	625	93	14.88	183	29.28	229	36.64	103	16.48	31	4.96	546	87.36
	KotaBukittin ggi	2838	358	12.61	505	17.79	621	21.88	503	17.72	454	16.00	2083	73.40

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2019

5. Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)

Zat besi merupakan tablet mineral yang diperlukan oleh tubuh untuk pembentukan sel darah merah atau hemoglobin. Unsur Fe merupakan unsur paling penting untuk pembentukan sel darah merah. *Zat besi* secara alamiah didapatkan dari makanan. Jika manusia kekurangan zat besi pada menu makanan yang dikonsumsinya sehari-hari, dapat menyebabkan gangguan anemia gizi (kurang darah). Tablet zat besi (Fe) sangat dibutuhkan oleh wanita hamil, sehingga ibu hamil diharuskan untuk mengonsumsi tablet Fe minimal sebanyak 60 tablet selama kehamilannya.

Manfaat Zat Besi (Fe)

Zat besi (Fe) berperan sebagai sebuah komponen yang membentuk *mioglobin*, yakni protein yang mendistribusikan oksigen menuju otot, membentuk enzim, dan kolagen. Selain itu, zat besi juga berperan bagi ketahanan tubuh.

Tablet zat besi (Fe) penting untuk ibu hamil karena memiliki beberapa fungsi berikut ini:

- Menambah asupan nutrisi pada janin
- Mencegah anemia defisiensi zat besi
- Mencegah pendarahan saat masa persalinan
- Menurunkan risiko kematian pada ibu karena pendarahan pada saat persalinan

Cakupan pemberian tablet zat besi di Kota Bukittinggi Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel .5.5 Cakupan Tablet Fe pada Bumil Per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH IBU HAMIL	FE1 (30 TABLET)		FE3 (90 TABLET)	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Mandiangan Koto Selayan	1142	1112	97.37	1067	93.43
2	Guguk Panjang	1071	987	92.16	992	92.62
3	Aur Birugo Tigo Baleh	625	572	91.52	554	88.64
KotaBukittinggi		2838	2.671	94.12	2.613	92.07

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2019

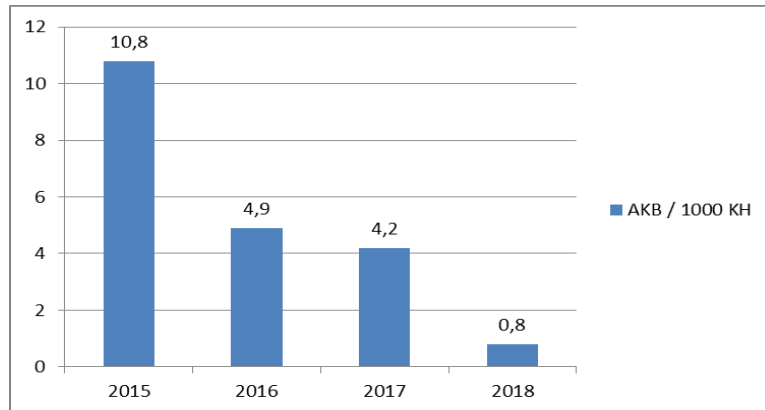
C.Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) merupakan salah satu indikator sangat sensitif untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat. AKB merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan AKB.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Jumlah Kematian Bayi di Kota Bukittinggi tahun 2018 adalah sebanyak 2 kasus, atau Angka Kematian Bayi sebesar 0,81/1.000 kelahiran hidup. Angka ini mengalami penurunan yang positif (kematian bayi mengalami penurunan) dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 4,2/1.000. Grafik perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bukittinggi dalam 4 tahun terakhir dapat di lihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 5.3. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Bukittinggi Tahun 2015-2018.



Sumber : Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2019.

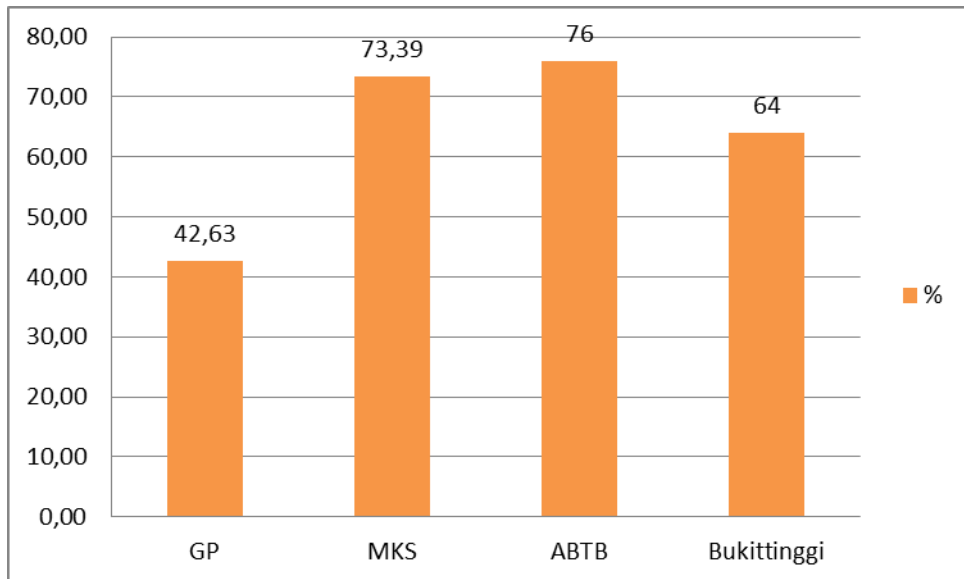
1. Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif (0-6 bulan)

Cara Pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapat makanan pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya.

ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi yang mengandung sel darah putih, protein dan zat kekebalan yang cocok untuk bayi. ASI membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal serta melindungi terhadap penyakit.

Tabel berikut ini menyajikan persentase kecendrungan cakupan anak usia 0 – 6 bulan yang mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif tahun 2018 di Kota Bukittinggi.

Gambar.5.4 Cakupan Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.



Sumber: Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Data pada tabel di atas menggambarkan bahwa pemberian ASI Eksklusif kepada bayi 0-6 bulan masih rendah, hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor ;

- Gencarnya promosi susu formula untuk bayi 0-6 bulan yang tidak ada masalah medis
- Masih adanya tenaga kesehatan yang tidak berpihak terhadap hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif dan mendorong untuk menggunakan susu formula pada bayi 0-6 bulan.
- Pemasaran susu formula masih banyak yang ditujukan pada bayi yang tidak punya masalah kesehatan.
- Masih sangat terbatasnya tenaga konselor ASI
- Belum maksimalnya kegiatan edukasi, sosialisasi, advokasi, dan kampanye terkait pemberian ASI,
- Belum semua rumah sakit melaksanakan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM)

Apabila dilihat dari jenis kelamin terlihat bahwa hamper sama cakupan bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif antara laki-lak dan perempuan.

2. Pelayanan Kesehatan Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Berat Badan Lahir Rendah didefinisikan sebagai bayi lahir yang berat badannya kurang dari 2500 gram. Bayi yang mempunyai berat badan lahir rendah sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kecerdasan anak, cenderung mempunyai pertumbuhan fisik yang terhambat. Selain itu mudah terkena infeksi. Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah Kota Bukittinggi tahun 2018 adalah 1,1%, dimana ditemukan 26 bayi dengan berat badan lahir <2500 gram dari 2.460 bayi yang lahir. Adapun cakupan BBLR pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6. Cakupan BBLR yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No	Kecamatan	Bayi BBLR								
		Laki-laki			Perempuan			L+P		
		Jml lahir hidup	BBLR	%	Jml lahir hidup	BBLR	%	Jml lahir hidup	BBLR	%
1	GP	451	4	0,9	448	1	0,2	899	5	0,6
2	MKS	542	10	1,8	502	7	1,4	1044	17	1,6
3	ABTB	256	1	0,4	261	3	1,1	517	4	0,8
Jumlah		1249	15	1,2	1211	11	0,9	2460	26	1,1

Sumber: Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua bayi BBLR perempuan dan laki-laki sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

3. Pelayanan Immunisasi Lengkap Pada Bayi 0-11 Bulan

Program imunisasi di Kota Bukittinggi merupakan bentuk pencegahan penyakit dan perlindungan terhadap penyakit dengan memberikan vaksin pada sasaran imunisasi. Program imunisasi ini dilakukan oleh petugas puskesmas, tidak hanya menunggu di puskesmas akan tetapi mencari dan melaksanakan imunisasi di luar puskesmas seperti posyandu dan pos-pos pelayanan kelurahan lainnya, serta dengan pengembangan program pada bidan-bidan praktek swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh terhadap masyarakat.

Immunisasi Dasar Lengkap adalah bayi yang telah mendapatkan semua immunisasi mulai dari HB 0, BCG dan Polio1, DPT-HB3/DPT-HB-Hib3 1 dan Polio 2, DPT-HB3/DPT-HB-Hib3 2 dan Polio 3, DPT-HB3/DPT-HB-Hib3 3 dan Polio 4 serta mendapatkan campak.

Tabel 5.7 Cakupan Immunisasi Dasar Lengkap Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No	Kecamatan	Sasaran			Jumlah Bayi Mendapatkan					
					Immunisasi Lengkap					
		L	P	L+P	Laki-laki		Perempuan		L+P	
					Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	GP	518	523	1041	422	81,47	389	74,38	811	77,91
2	ABTB	294	313	607	247	84,01	248	79,23	495	81,55
3	MKS	558	552	1110	464	83,15	482	87,32	946	85,23
Jumlah		1.370	1.388	2758	1.133	82,70	1.119	80,62	2252	81,65
Sumber : Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2019										

Selama tahun 2018, bayi laki-laki yang telah mendapatkan immunisasi lengkap sebanyak 82,7 % (1133 orang) sedangkan untuk bayi perempuan adalah sebanyak 80,62% (1119 orang).

4. Upaya Penanggulangan Gizi Buruk pada Balita

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan laporan LB3 Gizi dari 7 Puskesmas yang ada di Kota Bukittinggi ditemukan 19 orang (0,23%) Balita laki-laki yang memiliki berat badan di bawah garis merah (BGM) pada KMS dan 19 orang (0,23%) balita perempuan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.8. Cakupan Balita Bawah Garis Merah Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

KEC	DITIMBANG	JML	%
GP	3176	363	11.43
MKS	3776	243	6.43
ABTB	1801	165	9.16
	8753	771	8.8

Sumber Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2017.

Tabel. 5.9 Cakupan Balita Stunting Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018

KEC	DITIMBANG	JML	%
GP	3176	826	26
MKS	3776	683	18.09
ABTB	1801	415	23.04
	8753	1924	21.98

Sumber : DKK Bukittinggi Tahun 2019

Stunting adalah suatu kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan umur,. kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya.

Anak pendek adalah tanda dari adanya masalah gizi kronis pada pertumbuhan tubuh si kecil. Terlebih lagi, jika stunting dialami oleh anak yang masih di bawah usia 2 tahun. Hal ini harus segera ditangani dengan segera dan tepat, karena kalau dibiarkan kondisi ini dalam waktu yang lama akan berdampak terhadap kondisi fisik serta kemampuan kognitif si anak, serta produktifitasnya saat dewasa..

D. Posyandu

Tabel 5.10. Jumlah Posyandu menurut Strata Posyandu Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No	Kecamatan	Strata Posyandu				Jml	Posyandu Aktif	% Posyandu Aktif
		Pra tama	Ma dya	Pur nama	Man diri			
1	MKS	0	0	39	9	48	48	100
2	GP	0	19	32	5	56	43	76.8
3	ABTB	0	1	6	24	31	31	100
	Jumlah	0	20	77	38	135	122	90.4

Sumber: Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2017.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah posyandu yang ada di Kota Bukittinggi adalah sebanyak 135 posyandu dan yang aktif adalah 122 posyandu (90,4%).

E. Penderita HIV /AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebaga HIV positif.

Pemetaan epidemi HIV di Indonesia dibagi menjadi lima kategori, yaitu <90 kasus, 90-206 kasus, 207-323 kasus, 324-440 kasus, dan > 440 kasus. Di Kota Bukittinggi pada tahun 2017 kasus HIV sebanyak 36 kasus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 30 kasus, dimana penderita tersebut kebanyakan berasal dari luar wilayah Bukittinggi namun melakukan pengobatan di RSAM Bukittinggi.

Menurut jenis kelamin, proporsi kasus baru HIV / AIDS di Kota Bukittinggi tahun 2018 pada kelompok laki-laki lebih besar dibandingkan persentase pada kelompok perempuan. . Tabel dibawah ini merupakan kasus HIV AIDS tahun 2018.

Tabel 5.11. Cakupan Penderita HIV/AIDS berdasarkan Kelompok Umur di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No	Umur	HIV/ AIDS		
		Lk	Pr	Jml
1	≤ 4 th	1	0	1
2	5 – 14 th	0	0	0
3	15 – 19 th	1	0	1
4	20 – 29 th	15	2	17
5	30 – 39 th	23	5	28
6	40 – 49 th	21	4	25
6	50 - 59 th	2	0	2
7	>60 th	1	0	1
	Total	64	11	75

Sumber: Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2019.

F. Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu sarana untuk mengendalikan jumlah penduduk terutama untuk menekan angka kelahiran yang akhirnya menurunkan pertumbuhan penduduk. Sejak era otonomi daerah digulirkan yang berakibat pada desentralisasi kebijakan kependudukan, pelaksanaan program KB mengalami banyak kemunduran. Meskipun sudah ada upaya revitalisasi program KB Nasional sejak tahun 2009 namun belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

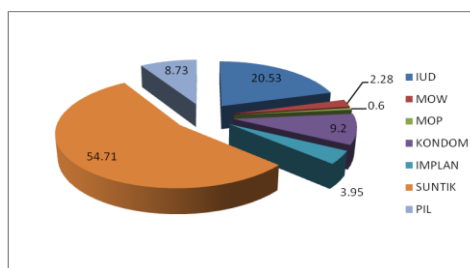
Tabel 5.12. Jumlah Peserta KB Aktif Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No	Kec.	Peserta KB Perempuan						Peserta KB Pria			Total
		IUD	MOW	Implan	Suntik	Pil	Jml	MO P	Kondom	Jml	
1	GP	1.120	207	497	1.337	392	3.553	36	241	277	3.830
2	MKS	1.524	141	365	1.698	415	4.143	17	241	258	4.401
3	ABTB	582	136	155	990	222	2.085	17	241	258	2.343
Jumlah		3.226	484	1.017	4.025	1.029	9.781	70	241	311	10.092

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (P3APPKB) Kota Bukittinggi .

Persentase Pasangan Usia Subur peserta KB berdasarkan Metode Kontrasepsi yang pernah digunakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 5.5. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Modern yang pernah digunakan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.



Sumber: DP3APPKB Tahun 2018.

Jumlah Peserta KB Baru (PB) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.13. Peserta KB Baru (PB) Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No	Kec	Peserta KB Perempuan						Peserta KB Pria			Total
		IUD	MOW	Im plant	Suntik	Pil	Jml	MOP	Kon dom	Jml	
1	MKS	398	11	107	593	193	1.302	3	77	80	1.382
2	GP	400	186	148	519	174	1.427	2	121	123	1.550
3	ABTB	212	7	59	427	106	811	0	121	121	932
Jumlah		1.010	204	314	1.539	473	3.540	5	319	324	3.864

Sumber: Dinas P3APPKB Tahun 2018.

G. Usia Perkawinan Pertama

Umur perkawinan Pertama bagi perempuan sangat mempengaruhi resiko melahirkan. Semakin rendah umur perkawinan pertama atau semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dari umur yang dianjurkan dalam program Keluarga Berencana, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan. Hal ini disebabkan belum matangnya kondisi perempuan baik secara fisik maupun psikologis, disamping itu bagi usia perkawinan pertama yang masih tergolong muda akan mengakibatkan anak tidak memperoleh hak atas pendidikan, hak bermain, kehilangan masa remaja dan kehilangan masa-masa dimana mereka seharusnya bias mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam hidup. Usia Perkawinan Pertama Hasil pendataan Keluarga Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.14. Usia Perkawinan Pertama Per Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2018.

No	Kecamatan	LAKI-LAKI					PEREMPUAN				
		-19	19-21	21-30	30	JML	-16	16-20	21-30	30	JML
1	MKS	0	2	134	51	187	0	9	148	30	187
2	GP	1	5	166	76	248	0	18	193	37	248
3	ABTB	1	7	245	106	359	1	15	276	67	359
Jumlah		2	14	545	233	794	1	42	617	134	794

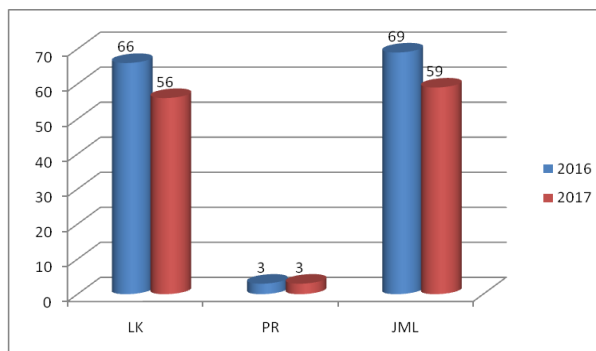
Sumber: Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 1 orang perempuan yang menikah diusia muda dan 2 orang laki-laki menikah diusia kurang dari 19 tahun. Terlihat bahwa perkawinan pertama di Kota Bukittinggi sebagian besar adalah pada usia lebih dari 21 tahun.

H. Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Gambar 5.6. Jumlah Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat Aditif lainnya (NAPZA) menurut Jenis kelamin Tahun 2017



Sumber: Polisi Resort Kota (Polresta) Bukittinggi Tahun 2017.

Gambar di atas memperlihatkan terdapat 59 orang pengguna narkoba yang ditangani Kepolisian tahun 2017 yang terdiri dari 56 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

Pengguna narkoba ternyata sudah tidak memandang jenis kelamin, dibuktikan dengan kasus yang terjadi ternyata walaupun dalam jumlah yang sedikit dibandingkan dengan laki-laki, perempuan yang sudah menjadi pengguna narkoba akan berdampak sangat besar pada masa depan perempuan tersebut dan keturunannya kelak.

BAB VI
GENDER DAN ANAK BIDANG
EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya, tetapi juga untuk mencapai kepuasan individu. Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam urusan ketenaga kerjaan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja, secara tidak langsung dapat menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara umum penduduk yang telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian, demikian pula dengan penduduk perempuan. Penduduk yang telah memasuki usia kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri atas penduduk bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Data mengenai ketenagakerjaan di Indonesia diperoleh berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun.

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja, baik yang bekerja atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah berusia 15 tahun ke atas. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja, bisa jadi mereka tergolong bukan angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Misalnya ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa dan sebagainya.

Pada tahun 2018 jumlah laki-laki usia 15 tahun keatas adalah 44.981 jiwa, sedangkan perempuan 49.069 jiwa.

Tabel 6.1. Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

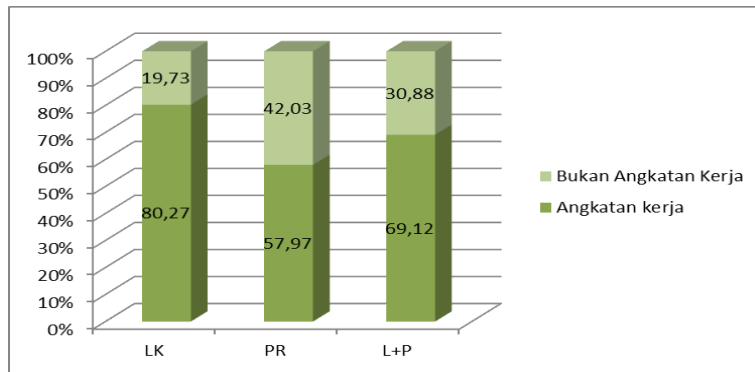
No	Kegiatan Utama	Lak-laki	Perempuan	LK +PR
I	Angkatan Kerja	36.107	28.444	64.551
	1. Bekerja	33.366	26.569	58.935
	2. Pengangguran	2.741	1.875	4.616
II	Bukan Angkatan Kerja	8.874	20.625	29.499
	1. Sekolah	5.430	9.072	14.502
	2. Mengurus rumah tangga	1.915	10.549	12.464
	3. Lainnya	1.529	1.004	2.533
III.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)(%)	80,27 %	57,097%	68,68%
IV	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7.59%	6,59%	7,15%

Sumber: BPS Kota Bukittinggi Tahun 2018, Hasil Sarkernas 2018.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bukittinggi pada tahun 2018 sebesar 68,68 %. Hal ini berarti sebanyak 69 dari 100 orang penduduk usia kerja termasuk dalam angkatan kerja. Terbagi menjadi 2 golongan yaitu penduduk yang bekerja sebanyak 58.935 orang dan pengangguran 4.616 orang.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin terlihat tingkat partisipasi angkatan kerja laki- laki lebih banyak dari pada perempuan yaitu laki-laki 80,27% berbanding 57,97% perempuan. Sebaliknya perempuan yang bukan angkatan kerja lebih besar dibandingkan laki-laki yaitu perempuan 20.625 orang berbanding dengan laki-laki sebanyak 8.874 orang Seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 6.1. Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin Tahun 2018



Sumber: BPS Kota Bukittinggi Tahun 2018.

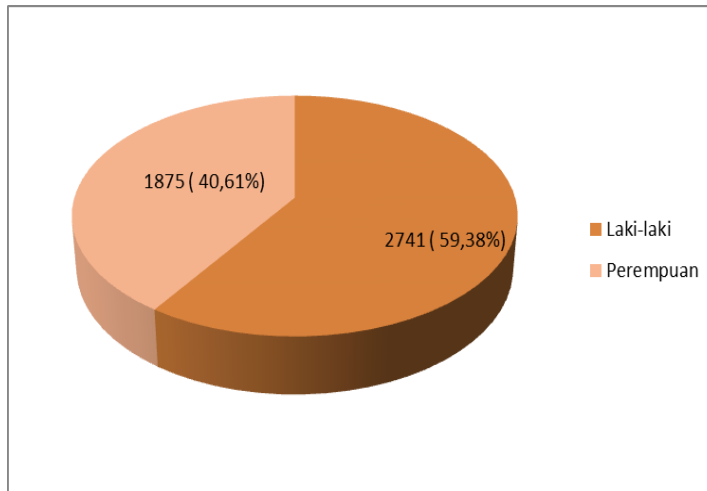
Banyaknya perempuan yang tidak termasuk angkatan kerja disebabkan perempuan yang berstatus sekolah dan ibu rumah tangga juga besar yaitu sebanyak 9.072 orang sekolah (18,5%)10.549 orang ibu rumah tangga atau sebesar 21,5% dari seluruh wanita berusia 15 tahun keatas.

B. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase penduduk yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, dan yang tidak mencari pekerjaan atau tidak mempersiapkan usaha karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan karena sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja biasanya tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kemiskinan dan kerawanan sosial yang ditimbulkannya.

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persentase antara pengangguran laki-laki dan perempuan. Data pengangguran dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 6.2 : Jumlah Penduduk 15 tahun keatas termasuk pengangguran Kota Bukittinggi Tahun 2018



Sumber : BPS Bukittinggi th 2018

C. Status Pekerjaan

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/ kegiatan. Indikator status pekerjaan terdiri dari enam kategori yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, berusaha dibantu buruh tidak tetap, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas dan pekerja keluarga/pekerja tak dibayar.

Tabel 6.2. Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun keatas Yang Bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama di Kota Bukittinggi Tahun 2018

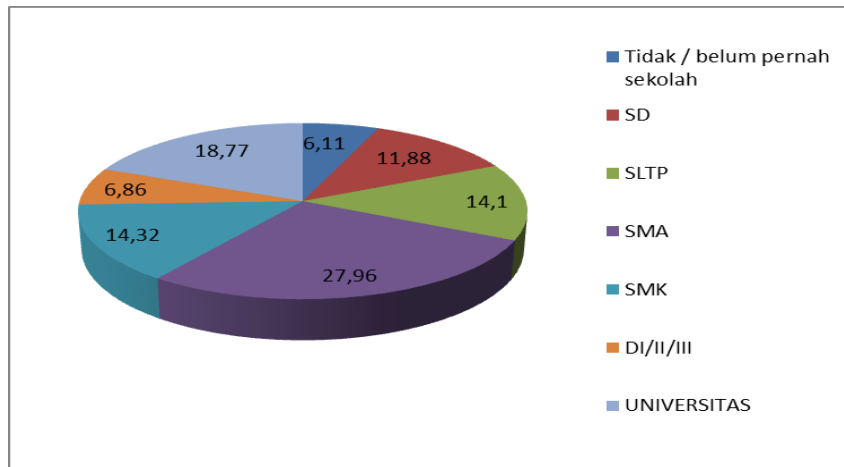
No	Status Pekerjaan Utama	Lk	Pr	Lk + Pr
1	Berusaha sendiri.	7.232	5.865	13.097
2	Berusaha dibantu buruh tdk tetap/ buruh tak dibayar.	2.844	3.112	5.956
3	Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar.	2.520	1.306	3.826
4	Buruh/karyawan/ pegawai.	16.360	10.658	27.018
5	Pekerja lainnya	4.410	5.628	10.038

Sumber: Sakernas BPS Kota Bukittinggi Tahun 2018.

Pada tahun 2018, mayoritas penduduk di Kota Bukittinggi bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai buruh / karyawan / pegawai.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk bekerja di Kota Bukittinggi Tahun 2018, mayoritas adalah SMA, sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 6.3 : Persentase penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang di tamatkan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.



Sumber ' BPS Tahun 2018

D. Lapangan Usaha

Bekerja merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan aktivitas ekonomi suatu wilayah. Lapangan usaha yang terbesar di Kota Bukittinggi adalah pada perdagangan besar dan eceran, rumah makan dan hotel.

Tabel 6.3. Persentase Penduduk berumur 15 Tahun keatas Yang Bekerja di Kegiatan Informal menurut Pekerjaan utama di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Lk	Pr	Lk + Pr
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan.	0,41	-	0,25
2	Industri/ pengolahan.	8,72	8,01	8,44
3	Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel.	40,14	32,18	37,05
4	Jasa Kemasyarakatan, social dan perorangan.	33,93	58,30	43,38
5	Lainnya	16,80	1,51	10,87

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Hasil Sakernas 2019.

Dari tabel di atas terlihat bahwa lapangan pekerjaan yang terbanyak baik laki-laki maupun perempuan banyak pada lapangan pekerjaan perdagangan, eceran, rumah makan, hotel dan jasa.

Tabel 6.4. Jumlah Pedagang Yang Berusaha Pada Petak Toko Dan Los Menurut Lokasi di Kota Bukittinggi 2017.

No	Lokasi Pasar	Basah	Kering	Jumlah
1	Pasar Atas	973	279	1.252
2	Pasar Bawah	622	703	1.325
3	Pasar Simpang Aur	1.497	4.383	5.880
	Jumlah	3.092	5.365	8.457

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah & Perdagangan (KUKMP) Kota Bukittinggi Tahun 2018.

E. Pekerja di Sektor Formal dan Informal

Pengelompokan tenaga kerja dapat dibedakan menurut kegiatan formal dan kegiatan informal. Pendekatan kelompok formal dan informal yang digunakan didasarkan kepada kombinasi antara status pekerjaan (employment status) dan jenis pekerjaan (occupation). Seorang pekerja dikategorikan pekerja formal didefinisikan sebagai pekerja yang berstatus “berusaha dibantu pekerja tetap/pekerja dibayar,” “buruh/karyawan,” di luar itu sebagai pekerja informal.

Tabel 6.5. Jumlah Penduduk Yang Berkerja menurut Status Formal dan Informal di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No	Status	Laki-laki		Perempuan		Laki2 + Perempuan	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Formal	18.880	56,58	11.964	42,35	30.844	50,06
2	Informal	14.486	43,42	16.286	57,65	30.772	49,94
Total		33.366	100	28.250	100	61.616	100

Sumber: Sakernas - BPS Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Kesulitan ekonomi dan tuntutan biaya kehidupan yang semakin tinggi, telah mendorong sebagian besar wanita untuk ikut berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarganya. Bagi wanita yang telah berkeluarga umumnya mereka bekerja untuk membantu suami dalam mencukupi biaya kehidupan sehari-hari. Dorongan dan keinginan wanita untuk bekerja tersebut sering kali tidak didukung oleh ketersediaan lapangan kerja, oleh karena itu mereka cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk bekerja disektor informal. Sektor informal merupakan bagian angkatan kerja di kota yang berada diluar pasar kerja yang terorganisir, yakni tidak tersentuh kebijakan pemerintah serta dapat meliputi kegiatan usaha yang sifatnya marginal dengan waktu kerja yang tidak teratur (Stephani, 2008).

Dari hasil survey angkatan kerja Nasional tahun 2018, sebanyak 57,65% penduduk perempuan bekerja di sektor in formal, lebih besar dibandingkan dengan laki-laki yaitu sebesar 43,42%.

F. Usaha Mikro dan Kecil (UKM)

Bukittinggi sebagai Kota wisata sangat besar pengaruhnya kepada roda perekonomian di Kota Bukittinggi, sehingga bermunculan usaha-usaha perekonomian masyarakat berupa Usaha Menengah Kecil dan Mikro yang terdiri dari sentra-sentra industri.

Tabel 6.6. Jumlah Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) Kota Bukittinggi Tahun 2016.

No.	Kec	Kecil	Menengah	Mikro	Jumlah
1.	ABTB	162	8	1688	1.858
2.	GP	315	19	2934	3.268
3.	MKS	175	4	1.710	1.889
Jumlah		652	31	6.332	7.015

Sumber: Dinas KUKMP Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Tabel 6.6. di atas menggambarkan bahwa UMKM yang paling banyak terdapat di Kota Bukittinggi adalah usaha mikro. Usaha mikro ini tersebar sebagian besar di Kecamatan Guguk Panjang dan lebih banyak dikelola oleh perempuan seperti terlihat pada tabel 6.7 berikut

Tabel 6.7. Data Jumlah Tenaga Kerja menurut Jenis Kelamin pada UMKM Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No.	Kecamatan	Kecil			Menengah			Mikro		
		L	P	L + P	L	P	L+P	L	P	L + P
1	ABTB	271	219	490	13	4	17	1.362	1.523	2.885
2	GP	404	297	701	38	17	55	1.196	1.330	2.526
3	MKS	253	241	494	6	42	48	908	971	1.879
Jumlah		928	757	1685	57	63	120	3466	3824	7290

Sumber: Dinas KUKMP Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Tabel di atas menggambarkan bahwa tenaga kerja pada usaha kecil dan menengah lebih banyak dikelola oleh laki-laki dibandingkan dengan tenaga perempuan, sedangkan untuk usaha mikro lebih banyak peranan perempuan dari pada laki-laki.

Data sentra industri yang ada di Kota Bukittinggi, pada umumnya bergerak pada industri pangan, sandang, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronik serta kerajinan. Jenis industri pangan terbanyak adalah usaha kue basah, kerupuk dan sejenisnya. Dan usaha ini lebih banyak menyerap tenaga kerja. Sedangkan jumlah industri di bidang sandang lebih banyak mengelola pakaian jadi dari tekstil dan juga banyak menyerap tenaga kerja, Jenis industri lain yang banyak di Kota Bukittinggi yaitu kerajinan khususnya bordir dan sulaman yang tenaga kerjanya pada umumnya adalah perempuan.

Tabel 6.8. Data Umum Industri di Kota Bukittinggi.

No.	Jenis Industri	Komoditi	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
1	Pangan	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan Daging Unggas.	3	8
2		Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran.	15	41
3		Industri Tahu Kedelai.	21	82
4		Industri Berbagai macam Tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sejenisnya.	6	22
5		Industri roti & sejenisnya.	31	121
6		Industri mkn dari coklat & kembang. Gula.	8	13
7		Industri makaroni, mie, spacheti, bihun, so'un dan sejenisnya.	6	12
8		Industri pengolahan the & kopi.	72	160
9		Industri bumbu masak & penyedap makanan.	2	12
10		Industri Kue Basah.	258	660
11		Industri makanan dan kegede dan kacang-kacangan lainnya selain kecap dan tempe.	27	59
12		Industri Kerupuk dan sejenisnya.	165	558
13		Industri Minuman ringan.	8	29
		industri Air Minum dan Air Mineral.	93	232
14	Sandang	Industri brg jadi (kain) rajutan.	6	19
15		Industri brg. jd tekstil kecuali untuk pakaian jadi.	81	365
16		Industri pakaian jadi dari tekstil.	373	1.933
17		Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi.	24	75
18		Industri brg dr kulit utk hewan.	4	5
19		Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari.	92	396
20	Kimia & Bahan Bangunan	Industri Moulding dan komponen bahan bangunan.	29	95
21		Industri percetakan.	72	243
22		Industri pupuk alam /Non Sintetis hara makro primer.	3	8
23		Industri Kosmetik.	1	4
24		Industri Jamu.	5	10
25		Industri Batu Bata dan tanah liat.	71	392
26		Industri gips.	7	7
27		Industri brg dr semen.	10	39
28		Industri brg dr kapur.	5	18
29		Industri Furnitur dr kayu.	55	229
30		Usaha rekaman.	10	37
31	Logam & Elektronika	Industri Brg dr logam bukan aluminium siap pasang utk bangunan.	60	201
32		Industri brg dr logam aluminium.	16	45
33		Industri macam2 wadah dr logam.	8	14
34		Pemeliharaan dan reparasi sepeda motor.	21	53
35		Pemeliharaan dan reparasi mobil.	64	154
36	Kerajinan	Industri bordir/sulaman.	303	1.955
37		Industri Anyaman dari Bambu.	1	3
38		Industri kerajinan ukir-ukiran dan kayu kecuali furnitur.	29	109
38		Industri kerajinan ukir-ukiran dan kayu kecuali furnitur.	29	109
39		Industri Pengolahan lain yang tidak di klasifikasikan di tempat lain.	67	213
Jumlah			2.132	8.631

Sumber: Dinas KUKMP Kota Bukittinggi Tahun 2017.

G. Koperasi

Koperasi merupakan badan hukum yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi terdiri dari beberapa jenis tergantung kepada tujuan koperasi atau latar belakang koperasi, misalnya koperasi Pegawai negeri Sipil, Koperasi Simpan Pinjam dan lain-lain.

Tabel 6.9. Partisipasi Perempuan sebagai Anggota Koperasi Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No	Kecamatan	Jml Koperasi			Anggota		
		Aktif	Tdk Aktif	Jumlah	L	P	L + P
1	MKS	13	1	14	877	866	1.743
2	ABTB	26	0	26	2.677	2.190	4.867
3	GP	49	4	53	4.385	4.712	9.097
Jumlah		88	5	93	7.939	7.768	15.707

Sumber: Dinas KUKMP Kota Bukittinggi Tahun 2018.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa partisipasi perempuan untuk ikut sebagai anggota koperasi cukup tinggi, ini berarti minat dari kaum perempuan cukup tinggi untuk peningkatan kesejahteraan kaum perempuan dan keluarganya serta masyarakat/organisasinya. Diharapkan peningkatan kesejahteraan ini mampu menciptakan perempuan yang maju dan lebih berdaya.

Kota Bukittinggi memiliki 92 koperasi pada 3 kecamatan, dan sudah bisa menyerap tenaga kerja/karyawan, seperti pada tabel berikut :

Tabel 6.10. Partisipasi Perempuan sebagai Pengurus Koperasi Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No	Kec	Aktif	Tdk Aktif	Jml Kop	Manager			Karyawan		
					L	P	L+P	L	P	L+P
1	MKS	13	1	14	1	0	1	20	14	34
2	ABTB	26	0	26	1	1	2	60	59	119
3	GP	49	4	53	1	2	3	28	69	97
Jumlah		88	5	93	3	3	6	108	142	250

Sumber: Dinas KUKMP Kota Bukittinggi Tahun 2018.

Data di atas memperlihatkan bahwa baik manager maupun karyawan yang menjadi pengurus koperasi sudah diduduki oleh lebih banyak kaum perempuan, hal ini membuktikan bahwa perempuan sudah dapat dipercaya sebagai tenaga yang dianggap mampu mengelola koperasi dikarenakan oleh ketelitian atau keahliannya

H. Kepala Keluarga Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Sesuai data dari BPS Bukittinggi, tahun 2018 terdapat 6315 jiwa atau 4,92 % penduduk Bukittinggi yang berada dibawah garis kemiskinan.

Kemiskinan adalah permasalahan sosial yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena akan berdampak langsung terhadap permasalahan ekonomi, sosial dan keamanan .

Tabel 6.11. Persentase Kepala Keluarga Miskin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2018.

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Jml Kepala Keluarga Miskin	%
1	GP	12.158	474	3,89
2.	MKS	14,044	140	0,99
3.	ABTB	7,230	313	4.33
Jumlah		33.432	620	1,85

Sumber: Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) Kota Bukittinggi Tahun 2019.

I. Kepala Rumah Tangga Perempuan

Perempuan sangat penting dalam keluarga, yang mengatur dan membuat rumah tangga menjadi tempat yang nyaman dan tenang untuk anggota keluarganya. Untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, dibutuhkan seorang istri yang dapat menjaga anak-anak, serta suaminya.

Faktor yang menyebabkan seorang perempuan menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangga, antara lain: karena perceraian, suami merantau, suami cacat, serta karena suami meninggal dunia.

Tidak mudah jika seorang perempuan menjadi kepala rumah tangga. Selain mempunyai beban dan tanggungan yang berat untuk keluarganya, ia juga harus mengurus keluarga secara total. Ia memikul beban ganda dalam rumah tangga, yakni mengurus rumah tangga sekaligus mencari nafkah.

Tabel 6.12 . Jumlah Kepala Rumat Tangga perempuan Kota Bukittinggi Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan
1	Guguk Panjang	511
2.	Mandiingin Koto Selayan	731
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	285
Jumlah		1527

Sumber: Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) Kota Bukittinggi Tahun 2019

J. Pekerja pada Instansi Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah

Tabel 6.13. Tenaga Kerja di Lembaga/BUMN/BUMD/Instansi Vertikal Tahun 2018

No	Lapangan Usaha	Jumlah Tenaga Kerja		JUMLAH
		L	P	
1	Kantor Pos	23	14	37
2	Bank Nagari	68	52	120
3	BRI	101	79	180
4	BNI	41	72	113
5	BTN	12	6	18
6	Kan Kemenag	110	227	337
7	BPS	7	17	24
8	PDAM		18	
9	Bulog		7	
10	Pengadilan Agama	20	14	34

11	Pengadilan Negeri	16	14	30
12	Kejaksaan Negeri	5	4	9
Jumlah				

Sumber: Instansi Vertikal/Lembaga Tahun 2019.

Tabel 6.14. Tenaga Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Tahun 2017 di Kota Bukittinggi.

No	NAMA PERGURUAN TINGGI	REKTOR/ DEKAN		DOSEN		KARYAWAN/ TENAGA PENDIDIK	
		L	P	L	P	L	P
1	UNP PGSD			15	29	6	6
2	AMIK BUKITTINGGI			6	10	5	6
3	UNIVERSITAS MHD. NATSIR	1		4	11	4	2
4	FAK. HUKUM MUHAMMADIYAH SUMBAR	1	1	23	10	7	5
5	POLTEKES PRODI KEBIDANAN	0	0	2	13	2	9
6	POLTEKES PRODI KESEHATAN GIGI	0	0	6	12	17	5
7	STIKES PRIMA NUSANTARA	3	6	3	8	8	4
8	STIKES YARSI	0	0	4	29	10	10
9	STIKES FORT DE KOCK	2	9	10	58	7	8
10	STIKES PERINTIS	3	9	5	15	14	19
11	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH	0	0	5	21	1	5
12	AKBID PELITA ANDALAS	0	4	1	6	1	3
13	AKFAR DWI FARMA	0	0	4	7	11	11
14	AKFAR YAYASAN IMAM BONJOL (YIB)	1	3	2	4	1	4
JUMLAH		11	32	90	233	94	97

Tabel 6.15. Jumlah Tenaga Kesehatan (Medis) di Kota Bukittinggi Tahun 2017.

No	Jenis Profesi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Dokter Spesialis	76	57	133
2	Dokter umum	36	76	112
3.	Dokter gigi	6	30	36
4.	Bidan	0	263	263
5.	Perawat	152	811	963
6.	Perawat gigi	7	38	45
7.	Tenaga Teknis kefarmasian	20	147	167
8.	Apoteker	13	49	62
9.	Kesehatan Masyarakat	27	49	76
10.	Kesehatan Lingkungan	5	7	12
11.	Nutrisionis	4	36	40
12.	Dietision	0	5	5
13.	Keterapian Fisik	18	23	41
14.	Keteknisian Medis	68	129	197
15.	Tenaga Kesehatan Lain	11	99	110
JUMLAH		443	1.819	2.262

BAB VII

BIDANG POLITIK DAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Keterlibatan perempuan dalam politik, merupakan sebuah keharusan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan secara politis. Dikuatirkan rendahnya keterlibatan perempuan di partai politik dan parlemen, berdampak langsung pada kecilnya alokasi perhatian terhadap pembangunan kesejahteraan perempuan, karena kebijakan-kebijakan dibuat tidak berdasarkan pada kepentingan dan kebutuhan perempuan, sehingga perempuan hanya diposisikan sebagai objek pembangunan dimana hak-hak dan kebutuhan kesejahterannya terabaikan.

Akhirnya yang terjadi adalah, perempuan selalu berada pada posisi yang marjinal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator, diantaranya dilihat dari sistem pengupahan, upah perempuan lebih rendah daripada laki-laki, jaminan kesehatan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki, kebijakan-kebijakan moralitas lebih berpihak pada laki-laki dan sebagainya. Minimnya keterlibatan dan partisipasi politik perempuan ini, menjadi penyumbang terhadap termarjinalnya perempuan dalam pembangunan.

Oleh sebab itulah negara-negara penanda tangan konvensi CEDAW PBB di desak untuk melakukan tindakan nyata dalam mengatasi segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan. Di Indonesia salah satunya lahir gerakan *affirmative action* tindakan khusus yang dilakukan oleh negara untuk memberikan peluang, kesempatan dan dorongan kepada perempuan agar terlibat dan berpartisipasi dalam politik. *Affirmative action* juga dapat difahami sebagai kompensasi negara terhadap perempuan yang selama ini termarjinalkan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang tidak berwawasan gender tersebut. *Affirmative action* ini berlaku setelah pemerintahan reformasi di Indonesia.

Bentuk dari *affirmative action* itu diantaranya adalah, *pertama* mengaruskan pada semua partai politik dimana 30% pengurusnya adalah perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat 1 UU No 12/2003. *Kedua* mengajukan prinsip keterwakilan perempuan dimana masing-masing partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Prinsip keterwakilan ini lebih dikenal dengan prinsip kuota 30% keterwakilan perempuan.

A. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan di daerah. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD mempunyai kebijakan yang sangat strategis dalam bidang politik, budaya, pembangun, ekonomi dan kesejahteraan. Untuk itu, sangat diperlukan keberimbangan anggota DPRD tersebut, sehingga terwujud ada kebijakan yang berimbang antara kepentingan kesejahteraan laki-laki dan perempuan.

Di kota Bukittinggi, kiprah perempuan dalam politik pertama-tama dapat dilihat dari komposisi perempuan dalam bidang politik. Data menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat dalam bidang politik, hanya saja apabila dibandingkan dengan laki-laki, keterlibatan perempuan jauh lebih rendah, hanya 2 orang (8%) perempuan yang duduk di legislatif dibandingkan laki-laki 23 orang (92%).

Tabel 7.1. Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi menurut Partai dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2018.

NO	PARTAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P
1	NASDEM	1	0	1
2	PKB	1	0	1
3	PKS	3	0	3
4	PDIP	1	0	1
5	GOLKAR	4	0	4
6	GERINDRA	4	0	4
7	DEMOKRAT	2	2	4
8	PAN	3	0	3
9	PPP	3	0	3
10	HANURA	1	0	1
TOTAL		23	2	25

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Angka ini masih jauh dari yang dicita-citakan, yakni 30% menurut Undang-undang No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD dan DPD.

Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya rendahnya kemauan perempuan untuk terlibat dalam politik atau belum munculnya kesadaran perempuan dalam berpolitik. Padahal undang-undang sudah memberikan peluang yang sangat besar agar perempuan mempunyai keterlibatan dalam berpolitik.

Keberdaan perempuan di DPRD akan terlihat peranannya di komisi yang ada. Misalnya tugas Komisi A terkait dengan pemerintahan yang meliputi pemerintahan kelurahan dan nagari, ketertiban, keamanan, penerangan, pers, hukum dan perundang-undangan, kepegawaian, aparatur dan ketenaga kerjaan, perizinan, sosial politik, organisasi kemasyarakatan, pertanahan, kependudukan, agama dan sosial budaya.

Komisi B mempunyai tugas di bidang perekonomian, keuangan dan kesejahteraan, meliputi perdagangan dari dalam dan luar negeri, perindustrian, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pengadaan pangan, logistik, koperasi, keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah, perusahaan patungan, dunia usaha dan penanaman modal, pengelolaan pasar, kesejahteraan rakyat meliputi pendidikan, ilmu dan teknologi, kepemudaan dan olahraga, kesehatan dan keluarga berencana, peranan wanita serta pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Komisi C bidang pembangunan meliputi pekerjaan umum, tata kota, pertamanan, kebersihan, perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata, lingkungan hidup, perumahan rakyat, pertambangan dan energi, perencanaan pembangunan.

Pada masing-masing tiga komisi tersebut mempunyai jumlah anggota yang berbeda-beda, termasuk juga perbedaan-perbedaan jumlah perempuan dalam masing-masing komisi tersebut. Bahkan khusus di Komisi C tidak ada anggota perempuan dalam komisi tersebut. Tentang jumlah sebaran anggota DPRD di masing-masing Komisi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.2. Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi menurut Komisi dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2018.

NO	KOMISI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L+P
1	I	6	1	8
2	II	7	1	9
3	III	7	0	8
4	Pada masing-masing komisi, pimpinan DPRD (Ketua dan wakil ketua sbg Koordinator	3	0	3
	TOTAL	23	2	25

Sumber: Setwan Kota Bukittinggi Tahun 2019.

B. Peran dan Komposisi Perempuan di Lembaga Eksekutif

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu urat nadi dalam organisasi pemerintahan, karena PNS sebagai penyelenggara pemerintahan. Oleh sebab itu, jumlah PNS yang tersedia secara lengkap dan profesional merupakan salah satu hal yang sangat mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berkualitas dan baik. PNS juga berperan sebagai pelayan daripada masyarakat, oleh sebab itu jumlahnya juga sangat menentukan terhadap kualitas layanan tersebut. Saat ini, di kota Bukittinggi terdapat sebanyak 2649 orang PNS yang akan melayani 128.783 penduduk kota Bukittinggi.

Dari 2649 jumlah PNS yang ada di Kota Bukittinggi, terdapat 1.604 perempuan atau 60,55% dan 1045 orang laki-laki atau 39,45%. Dengan demikian PNS berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan PNS laki-laki di kota Bukittinggi.

Bila dilihat dari jenis pendidikan terdapat pendidikan terbanyak adalah sarjana S1 (54,3%) dan S2 sebanyak 7,6%. Jumlah PNS Kota Bukittinggi menurut pendidikan dan jenis kelamin ini dapat dilihat dengan jelas pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018.

NO	PENDIDIKAN	LAK-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SD	71	2	73
2	SMP	34	3	37
3	SMA	312	178	490
4	D.1	0	9	9
5	D.2	11	48	59
6	D.3	58	253	311
7	D.4	15	13	28
8	S.1	442	997	1439
9	S.2	102	101	203
10	S.3	0	0	0
TOTAL		1045	1604	2649

Sumber: Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bukittinggi Tahun 2018.

Selanjutnya, jika dilihat lebih rinci jumlah PNS menurut golongan dan jenis kelamin di Kota Bukittinggi maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya PNS perempuan bergolongan I dan II jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki. Disamping itu, di golongan III dan IV, PNS perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.4. Jumlah PNS menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	I	85	5	90
2	II	283	124	407
3	III	494	1079	1573
4	IV	183	396	579
Total		1045	1604	2649

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2019.

2. Perempuan Menduduki Jabatan Eselon

Pada tahun 2018, PNS yang menduduki jabatan eselon di Kota Bukittinggi berjumlah 552 orang. Dari jumlah tersebut hanya 3 orang yang menduduki eselon II sebagai pengambil kebijakan, dimana laki-laki lebih dominan yaitu 22 orang, padahal jumlah perempuan menjadi PNS di Kota Bukittinggi lebih banyak dari pada laki-laki. Perbandingannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.5. Jumlah PNS menurut Esselon dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018.

NO.	ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	II.a	1	0	1
2	II.b	22	3	25
3	III.a	28	10	38
4	III.b	37	30	67
5	IV.a	149	160	309
6	IV.b	28	84	112
7	V.a	0	0	0
Total		265	287	552

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2019.

3. Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin

Pada tabel 7.6. di bawah terlihat bahwa PNS yang menduduki jabatan Fungsional lebih didominasi oleh perempuan yang tersebar sebagai tenaga pendidik/guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, PLKB dan lain-lain.

Tabel 7.6. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin Tahun 2018.

No.	Jenis PNS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS Struktural	865	800	1665
2	PNS Fungsional Guru	103	533	636
3	PNS Fungsional Lain	77	271	348
Total		1045	1604	2649

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2019.

4. Camat

Di Kota Bukittinggi terdapat tiga kecamatan, yakni kecamatan Guguk Panjang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan Aur Birugo Tigo Baleh. Masing-masing kecamatan ini dipimpin oleh seorang camat. Untuk ketiga kecamatan tersebut camatnya laki-laki dan bahkan belum pernah ada perempuan.

Pada tingkat kecamatan, masyarakat belum pernah dipimpin oleh seorang camat perempuan. Jika dilihat pada masing-masing kecamatan itu perempuan selalu lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki.

Tabel 7.7. Jumlah Camat di Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	KECAMATAN	L	P	JML
1	GP	1	0	1
2	MKS	1	0	1
3	ABTB	1	0	1
JUMLAH		3	0	3

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2019

5. Jumlah Lurah di Kota Bukittinggi

Di Kota Bukittinggi terdapat 24 kelurahan dari tiga kecamatan. Di kota Bukittinggi hanya ada lurah dan tidak ada nagari, namun sampai tahun 2018 hanya 3 lurah yang perempuan. Dari data di atas tergambar bahwa pada tingkat kepemimpinan terendah (Kelurahan) di Kota Bukittinggi masih didominasi oleh laki-

laki yaitu 88% atau 21 orang. Sebagaimana datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.8. Jumlah Lurah menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	GP	6	1	7
2	MKS	8	1	9
3	ABTB	7	1	8
	JUMLAH	21	3	24

Sumber : BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jabatan-jabatan strategis sampai pada kelurahan di Kota Bukittinggi didominasi oleh laki-laki.

Selain dari lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, juga terdapat PNS yang dari jalur vertikal, seperti dari Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, adapun PNS dari Kantor Kementerian Agama tersebut adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.9. Jumlah Pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018.

NO	INSTANSI	PNS			NON PNS		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	KANKEMENAG	110	227	337	-	-	0
2	MADRASAH	-	-	0	-	-	0
	- RA	-	1	1	-	17	17
	- MI	1	18	19	4	25	29
	- MTs	18	71	89	20	83	103
	- MA	21	72	93	35	92	127
3	PENYULUH AGAMA	8	6	14	14	24	38
4	DA'I	9	3	12	33	39	72
5	TPA	-	-	0	124	259	383
6	MDTA	10	4	14	95	305	400
	JUMLAH	177	402	579	325	844	1169

Sumber : Kantor Kemenag Kota Bukittinggi Tahun 2019

Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi secara keseluruhan, tenaga pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki, akan tetapi keberadaan perempuan adalah yang bekerja sebagai tenaga pengajar di madrasah atau di pendidikan. Sedangkan untuk tenaga da'i, penyuluh agama masih didominasi oleh laki-laki pada Pegawai Negeri Sipil.. Data ini menggambarkan pada pegawai non PNS sudah terlihat presentase yang lebih pada penyuluh agama, dai, TPA dan MDTA. Tenaga penyuluh agama serta da'i perempuan perlu ada, sehingga persoalan yang erat kaitannya dengan perempuan lebih dapat disampaikan secara lugas sesuai dengan kodratnya.

C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif

Representasi perempuan di Lembaga Yudikatif dapat dilihat pada lembaga hukum. Representasi perempuan diperlukan pada lembaga yudikatif karena banyak persoalan hukum yang dialami perempuan belum mendapatkan penanganan dan perlindungan yang adil. Hal ini tidak saja karena jumlah perempuan yang sedikit di lembaga-lembaga penegakan hukum, tetapi juga karena masih kuatnya bias gender di dalam lembaga yang bersangkutan maupun di dalam masyarakat.

1. Jaksa Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Salah satu lembaga yudikatif adalah kejaksaan. Representasi perempuan dapat dilihat pada jumlah perempuan di Kejaksaan seperti pada tabel 7.10 berikut:

Tabel 7.10. Data Ketenagaan Perempuan sebagai pengambil kebijakan pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Tahun 2017 dan 2018

No	Jabatan	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Lk	Pr	Lk	Pr
1.	Kepala Kejaksaan Negeri	1	0	1	0
2.	Kepala Sub Bag Pembinaan	0	1	0	1
3.	Kepala Seksi Inteligen	1	0	1	0
4.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	1	0	1	0
5.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	1	0	1	0
6.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	0	1	0	1
7.	Kepala Urusan Kepegawaian	0	1	0	1
8.	Kepala Urusan Keuangan	0	1	0	1
9.	Kepala Urusan Data Statistik dan Kriminologi	1	0	1	0
	JUMLAH	5	4	5	4

Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi Tahun 2019.

2. Hakim Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Tabel 7.11. Data Hakim menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017 dan Tahun 2018.

NO	JABATAN	TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		L	P	L	P
1	KETUA	0	1	1	0
2	WAKIL KETUA	0	0	1	0
3	HAKIM	2	2	2	2
4	PANITERA	0	1	1	0
5	SEKRETARIS	0	1	0	1
6	WAKIL PANITERA	1	0	1	0
7	PANITERA MUDA	2	1	2	1
8	KEPALA SUB BAGIAN	2	1	2	1
9	PANITERA PENGGANTI	5	5	3	5
10	JURU SITA	1	1	1	1
11	JURU SITA PENGGANTI	1	2	1	2
12	STAF	1	2	1	1
	JUMLAH	15	17	16	14

Sumber: Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi Tahun 2019

3. Polisi Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Tabel 7.12. Data Kepolisian menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017.

NO	JENIS KEPANGKATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L+P
1	Perwira Tinggi			
	a. Jenderal Polisi	0	0	0
	b. Komisaris Jendral Polisi	0	0	0
	c. Inspektur Jenderal Polisi	0	0	0
	d. Brigadir Jenderal Polisi	0	0	0
2	Perwira Menengah (PAMEN)			
	a. Komisaris Besar Polisi	0	0	0
	b. Ajun Komisaris Besar Polisi	1	0	1
	c. Komisaris Polisi	6	0	6
3	Perwira Pertama (PAMA)			
	a. Ajun Komisaris Polisi	8	2	10
	b. Inspektur Satu Polisi	21	2	23
	c. Inspektur dua Polisi	42	2	44
4	Bintara	283	34	417
	JUMLAH	461	40	501

Sumber: Sumda Polresta Kota Bukittinggi.

Bila dilihat dari data di atas tergambar bahwa perempuan masih relatif sedikit dibandingkan laki-laki. Hal ini berimplikasi terhadap perlindungan perempuan dan anak. Karena sejauh ini realitas menunjukkan bahwa sensitifitas gender terhadap penegak hukum masih relative rendah. Oleh karena itu tidak jarang kasus-kasus yang menimpa perempuan karena kepengurusannya kurang diperhatikan secara optimal.

D. Pengurus Organisasi Sosial, Kemasyarakatan dan Politik

1. Data Organisasi Sosial, Kemasyarakatan dan Politik

Maraknya organisasi-organisasi perempuan, organisasi sosial, kemasyarakatan dan forum-forum yang beranggotakan perempuan merupakan salah satu indikator bahwa potensi perempuan sangat besar dan mempunyai peluang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya peranan perempuan disegala aspek kehidupan. Organisasi perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi organisasi perempuan khususnya dalam bidang pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari komitmen yang tinggi melalui manajemen yang diterapkan serta peningkatan kinerja individu pada organisasi tersebut, apabila organisasi atau kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan terkelola dengan baik maka pembangunan pemberdayaan perempuan akan lebih eksis dan lebih optimal.

Tabel 7.13. Data Organisasi Sosial, Kemasyarakatan dan Politik Tahun 2018.

No	Nama Organisasi	Nama Pimpinan/Ketua	Alamat
1	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kota Bukittinggi.	Ny. Yesi Endriani Ramlan Nurmatias	Jl. Perwira Belakang Balok.
2	Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Bukittinggi.	Ny. Khadijah Irwandi	Jl. Perwira Belakang Balok.
3	Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Bukittinggi.	Ny. Tuti Sofyan	Hotel Bunda, Jl. Guru Hamzah.
4	Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) Kota Bukittinggi.	Ny. Yesi Endriani Ramlan Nurmatias	Jl. Perwira Belakang Balok.
5	Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Bukittinggi.	Ny. Arifah Inas	Jl. Perwira Belakang Balok.
6	Ikatan Kartini Profesional Indonesia (IKAPRI) Kota Bukittinggi.	Ny. Emmalinda Chaidir	Jl. Sudirman Birugo.
7	Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia (IPEMI) Kota Bukittinggi.		
8	Forum Bundo Kota Bukittinggi.	Ny. Elfianis	Kel. Puhun Tembok.

9	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bukittinggi.	Ny. Yesi Endriani Ramlan Nurmatias.	Jl. Perwira Belakang Balok.
10	Bundo Kanduang (BK) Kota Bukittinggi.	Ny. Efni, S.Pd	Jirek, Kel. Puhun Pintu Kabun.
11	Persatuan Wanita Kurai (PWK) Kota Bukittinggi.	Ny. Zulzetri, M.Pd	Pulai, Kel. Pulai Anak Air.
12	Pusat Kajian Wanita (PKW) Kota Bukittinggi.	DR. Silvia Hanani	IAIN Kubang Putih.
13	Ikatan Istri Pegawai Bank Daerah (ISBANDA) Kota Bukittinggi.	Ny. Mesti Epi Muluk	Bank Nagari Pasar Atas.
14	Ikatan Istri Pegawai Bank Rakyat Indonesia (IWABRI) Kota Bukittinggi.	Ny. Mulyadi	BRI Pasar Atas.
15	Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) Kota Bukittinggi.	Ny. Eva Yunilawati	RSAM.
16	Dharma Yutikarini Kota Bukittinggi.	Ny. Helmyah Faiqoh Dadi Rachmadi	Luak Anyia, Kel. Kubu Gulai Bancah.
17	Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Bukittinggi	Ny. Paulina, S.ST	Tengah Jua, Kel. Aur Kuning.
18	Persatuan Bujang jo Gadih	Wendy E S Candra	Jl.Hamka Situpo Gurun Panjang
19	LSM Palanta	Fiki Ananda, A.Md	Jl. Hamka No 42B Guguk Panjang
20	DHC 45	H.Meiwakidi	Markas Komando Jl.Sudirman No.27-29
21	LSM Yayasan Peduli Perjuangan pemerintah Darurat Republik Indonesia /LSM YP3DRI	Drs. Afdhal Ali Fahmi	Jl.Sutan Syahrir No 50
22	LSM Semangat Baru Bukittinggi (LSM SBB)	Yuli Santos	Jln.Tuanku Laras Kayu Kubu
23	LKS Kita Semua Sama (KISESA)	Antoni Firdaus	Jln.Tuanku Kubu Kayu Kubu Kec G.Panjang
24	Yayasan Griya Yatim & Dhuafa/GYD	Aziz Gunawan	Jl.Adinegoro No 06 Aur Kuning
25	Badan Wakaf Indonesia BWI	DR.Saiful Amin.M.Ag	Jl. Batang Ombilin II No 10

Sumber : Kantor Kesbangpol Th 2019

2. Pengurus Harian Partai Politik

Di dalam kepengurusan harian partai politik, perempuan sudah mulai terlihat berperan, walaupun jumlahnya masih di bawah laki-laki.

Tabel 7.14. Jumlah Pengurus Harian Partai Politik Menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No	Parpol	No. SK/ Tanggal	Laki-laki	Perempuan	Jml
1	PPP	05/SK/DPW/C/XII/2016, 1 Desember 2016	27	14	41
2	Golkar	005/4/GKSD/VIII/2016 22 Agustus 2016	42	22	64
3	Gerindra	09-0143/Kpts/DPP GERINDRA/2012, 1 September 2012	36	19	55
4	Nasdem	589-SK/DPP-NASDEM/XI/2013	53	38	91
5	PDIP	24.05/KPTS/DPC/DPP/III/2015 7 Maret 2015	9	7	16
6	Demokrat	/SK/DPP.PD/DPC/VIII/2012	14	7	21
7	Hanura	SKEP/025/DPDSB/ HANURA/VIII/2016, 19 Agustus 2016	13	9	22
8	PKS	074/D/SKEP/AC00-PKS/1432, 2 Mei 2016	5	1	6
Jumlah			199	117	316

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2019

3. Kaukus Perempuan Politik

SK. KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) dengan Nomor SK. Walikota Bukittinggi Nomor 476/671/DP3APPKB/VII-18 tanggal Juli 2018, tentang Pembentukan Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota Bukittinggi Periode 2018-2022.

4. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertugas memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan dan pemindahan jabatan, kenaikan pangkat istimewa serta penunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai peserta diklat jabatan. Oleh sebab itu eksistensinya sangat penting dalam suatu pemerintahan dan institusi.

Pemerintahan Kota Bukittinggi sampai Agustus 2018 hanya ada 6 (enam) orang Badan Pertimbangan Jabatan ini. Dari enam orang itu semuanya adalah laki-laki. Tidak satu pun perempuan. Pada hal, jika dilihat dari jumlah PNS yang ada di lingkungan pemerintahan kota Bukittinggi perempuan merupakan jumlah yang terbanyak dibandingkan dengan PNS laki-laki.

Tabel 7.15. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Bukittinggi menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

No.	Badan Pertimbangan Jabatan & Kepangkatan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	L+P
1	Sekretaris Daerah	1	0	1
2	Asisten I	1	0	1
3	Asisten II	1	0	1
4	Asisten III	1	0	1
5	Kepala BKPSDM	0	1	1
6	Kepala Inspektorat	1	0	1
	Jumlah	5	1	6

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2019.

BAB VIII
BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

A. Bidang Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan kepadanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender diperlukan kebijakan yang bisa menjadi payung hukum agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

1. Kebijakan/Program/Kegiatan yang Responsif Gender Kota Bukittinggi

Tabel 8.1. Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang Responsif Gender di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No	SKPD	Kebijakan	Program	Kegiatan
1	Dinas P3APPKB.	Perwako No. Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kota Bukittinggi Tahun 2018.	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak & Perempuan.	Fasilitasi penguatan kota layak anak melalui pembentukan kelurahan ramah anak.
				Fasilitasi Pengembangan & Perkuatan Forum Anak Daerah (FORDA) & Peringatan Hari Anak.
			Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak.	Perkuatan & Pengembangan P2TP2A.
				Pembinaan Perempuan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga.
			Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan.	Penguatan Ekonomi Perempuan Rentan Melalui KIE, Pelatihan, Pemberian Bantuan & Pameran.

				Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS).
			Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.	Fasilitasi & Perkuatan Organisasi Perempuan.
				Bimbingan & Pelatihan Politik oleh Kantor Kesbangpol.
				Bimbingan & Pelatihan Jabatan Publik.
				Fasilitasi Peringatan Hari Ibu.
				Penyelenggaraan, Pembinaan & Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
2	Dinas Kesehatan.		Upaya Kesehatan Masyarakat.	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan & Pengembangan.
				Jaminan Persalinan.
			Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat.	Fasilitasi Kota Sehat.
				Monitoring & Pembinaan Pokjantal Posyandu & DBD.
			Perbaikan Gizi Masyarakat.	Penanggulangan KEP, Anemia, GAKY, KVA & Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya.
				Monitoring & Evaluasi.
				KIE, Integrasi Program Gizi.
			Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak.	Peningkatan Kesehatan Ibu & Anak.
3	Dinas Sosial.		Pembinaan Anak Terlantar.	
			Perlindungan & Jaminan Sosial.	Fasilitasi & Penguatan Program Keluarga Harapan.
			Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.	
4	Dinas Kesehatan.		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.	Pelayanan Kesehatan Lansia.
5	Dinas Pendidikan & Kebudayaan.		Program Wajib Belajar 9 tahun.	Penunjang Operasional SD/ SLTP.
			Pendidikan Luar Biasa.	Penyelenggaraan SDLB Manggis Ganting.
			Pendidikan Non Formal.	Penyelenggaraan

				Pendidikan Non Formal Paket A Setara SD.
				Peningkatan Kompetensi Warga Belajar Paket C (Paket C Vokasional).
				Penyelenggaraan UPTD SKB Kota Bukittinggi.
				Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B & C.
				Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket B Setara SMP.
				Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket C Setara SMA.
				Pemberian Pendidikan Dasar Membaca Al-Qur'an.
6	Sekretariat Daerah.		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.	
7	BKPSDM.		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	
			Pencegahan Penanganan Rehabilitasi Narkoba.	
			Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan.	
8	Badan Keuangan.		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	
9	Dinas P3APPKB.		Keluarga Berencana.	Pelayanan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling KB/KS.
				Kegiatan Pelayanan KB Serentak dan Komplikasi.
				Pembelian Penghargaan KB Teladan.
				Kegiatan Fasilitasi Koalisi Kependudukan.
				Kegiatan Penunjang Operasional PPKBK, Sub PPKBK dan Kader Poktan.
				Kegiatan Fasilitasi Lapangan Program KKBPK.
				Kegiatan Fasilitasi/ Pelaksanaan Kampung KB.
				Kegiatan Penunjang

				Operasional Peserta KB, IUD, Implant dan Kader KB.
				Kegiatan Penyelenggaraan Bimbingan Terpadu Program KKBPK.
				Kegiatan Pelatihan Motifator MOP bagi Peserta KB Pria.
				Operasional Penyuluhan KB Bantuan Operasional Keluarga.
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja.	Pusat Informasi Konseling Remaja.
				Pelatihan KRR bagi PS/KS.
				Fasilitasi Program Generasi Berencana.
				Kancah Bakti Saka Kencana.
			Program Pelayanan Kontrasepsi.	Penunjang Operasional Klinik KB.
				Fasilitasi Pembentukan & Pengembangan Poktan.
10	Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan.		Peningkatan, Pengembangan Sarana & Prasarana Pasar.	Pemeliharaan Pasar.
11	Dinas Kominfo.		Kerjasama Komunikasi Informasi dan Media Massa.	Pengawasan & Pembinaan Warung Internet.
12	Dinas Kebakaran.		Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran.	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
13	Dinas Duk Capil.		Penataan Administrasi Kependudukan.	Pelayanan Akta Kelahiran.
14	Sekretariat Daerah.		Peningkatan Pemahaman Pengamalan Kehidupan Beragama Masyarakat.	Monitoring, Evaluasi, Verifikasi, Bantuan Tunjangan Kesejahteraan Guru MDTA, TPQ, TKQ, TPSQ, Pondok Qur'an, Ponpes & Garin Mesjid/ Mushala.
15	Bapelitbang.		Program Perencanaan Pembangunan Daerah.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.
16	Dinas Perhubungan.		Pengendalian & Pengamanan Lalu Lintas.	Pengawasan & Pengendalian Lalu Lintas.
17	Dinas Perpustakaan & Kearsipan.		Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	Gerakan Bukittinggi Membaca.

18	Dinas Satpol PP.		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.	Sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah Kota Bukittinggi di Lingkungan Pendidikan.
19	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga.		Pengembangan Pemasaran Pariwisata.	Pemilihan Duta Wisata Kota Bukittinggi.
20	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian & Tenaga Kerja.		Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja.	Pelatihan Kewirausahaan.
21	Dinas PU & Penataan Ruang.		Pembangunan Jalan & Jembatan.	Peningkatan Trotoar.
22	BPBD.		Pencegahan Dini & Penanggulangan Bencana.	Operasional Pusat pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana.
23	Kantor Kesatuan Bangsa & Politik.		Pencegahan, Penanganan & Rehabilitasi Narkoba.	Operasional Komunitas Pemuda Anti Narkoba (Kompani) Kota Bukittinggi.
24	Dinas Lingkungan Hidup.		Peningkatan Kualitas & Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan.	Pembinaan Masyarakat Sekitar Aliran Batang Agam.
25	Dinas Perumahan Rakyat & Penataan Kawasan Pemukiman.		Program Lingkungan Sehat Perumahan.	Peningkatan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan.
26	Dinas Pendidikan & Kebudayaan.		Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.	Pembinaan dan Seleksi Guru Berprestasi Jenjang TK, SD & SLTP.
27	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM.		Program Peningkatan Kapasitas & Sumber Daya Aparatur.	Kegiatan Pendidikan & Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi Mengikuti Tugas Belajar & Izin Belajar.

Tabel 8.2. Peraturan dan Kebijakan Daerah yang Responsif Gender 5 Tahun Terakhir.

No	Bentuk/ Jenis Peraturan	Nomor Peraturan	Judul Peraturan	Perangkat Daerah Pemrakarsa
1	Peraturan Daerah		RPJMD Tahun 2016-2021.	Bappeda

2	Peraturan Daerah	04 Tahun 2015	Perlindungan Perempuan dan Anak.	PPKB
3	Peraturan Daerah	1 Tahun 2012	Kawasan Tanpa Rokok.	Dinas Kesehatan
4	Peraturan Daerah	2 Tahun 2015	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.	Dinas Kebakaran
5	Peraturan Daerah	13 Tahun 2016	Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta didik baru Kota Bukittinggi.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Peraturan Walikota	12 Tahun 2015	Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Bukittinggi.	PPKB
7	Peraturan Walikota	43 Tahun 2014	Persyaratan tempat khusus merokok pada kawasan tanpa rokok.	Dinas Kesehatan
8	Peraturan Walikota	28 Tahun 2014	Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Peraturan Walikota	41 Tahun 2014	Pedoman pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tk. pratama di lingkungan Pemko Bukittinggi.	Dinas Kesehatan
10	Keputusan Walikota	188.45-57-2018	Pembentukan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Kota Bukittinggi Tahun 2018.	DP3APPKB dan Bapelitbang
11	Keputusan Walikota	188.45-158-2018	Pembentukan Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bukittinggi.	DP3APPKB
12	Surat Edaran Walikota	463/004/PPKB/I V/2015 7 April 2015	Percepatan Pengarusutamaan Gender.	DP3APPKB
13	Keputusan Walikota	188-45-57-2018 Tahun: 2018	Pembentukan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Kota Bukittinggi Tahun 2018.	DP3APPKB
14	Keputusan Walikota	188.45-58-2018 Tahun: 2018	Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2018.	DP3APPKB
15	Keputusan Walikota	476/671/DP3APPKB/VII-2018 Tahun: 2018	Pembentukan Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota Bukittinggi tahun 2018-2022.	
16	Keputusan Walikota	188.45-115-2018 Tahun: 2018	Pembentukan Focal Point/ Gugus Tugas Penanggung Jawab Pengarusutamaan Gender di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.	
17	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-349-2016 Tahun: 2016	Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Tingkat Kota Bukittinggi Masa Bakti 2016-2018.	DP3APPKB
18	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45.349-2016 Tahun: 2016	Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Tingkat Kota Bukittinggi Masa Bakti 2016-2018.	DP3APPKB

19	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-202-2015 Tahun: 2015	Perubahan Keputusan Walikota Nomor. 188- 45-202-2015 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Seayun Selangkah Kota Bukittinggi Periode 2015-2018.	DP3APPKB
20	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-015-2016 Tahun: 2016	Penetapan Kelurahan Benteng Pasar Atas Sebagai Kelurahan Layak Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB
21	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-016-2016 Tahun: 2016	Penetapan Kelurahan Tarok Dipo Sebagai Kelurahan Layak Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB
22	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-182-2015 Tahun: 2015	Penetapan Kelurahan Layak Anak di di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB
23	Surat Edaran Walikota Bukittinggi	27/Din.Kes/II-2015 Tahun: 2015	Kawasan Tanpa Rokok.	DP3APPKB
24	Surat Edaran Walikota Bukittinggi	478-25/ DP3APPKB// 2016 Tahun :2016	Pemberian ASI Eksklusif.	DP3APPKB
25	Surat Edaran Walikota Bukittinggi	Nomor :478-22/ DP3APPKB// 2017 Tahun :2017	Penyediaan Ruang Laktasi.	DP3APPKB
26	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-012-2017 Tahun: 2017	Penunjukan Puskesmas Rasimah Ahmad sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB
27	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-017-2016 Tahun: 2016	Penunjukan Puskesmas Gulai Bancah sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB
28	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-018-2016 Tahun: 2016	Penunjukan Puskesmas Mandiangin sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB
29	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-36-2015 Tahun: 2015	Penunjukan Puskesmas Plus Mandiangin sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB
30	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-37-2015 Tahun: 2015	Penunjukan Puskesmas Guguk Panjang sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB
31	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-160-2016 Tahun: 2016	Penetapan Guguk Panjang Sebagai Kecamatan Layak Anak (KELANA) di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB
32	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-107-2016 Tahun: 2016	Penetapan Aur Birugo Tigo Baleh Sebagai Kecamatan Layak Anak (KELANA) di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB
33	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-142-2015 Tahun: 2015	Penetapan Mandiangin Koto Selayan Sebagai Kecamatan Layak Anak (KELANA) di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB

34	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-92-2014 Tahun: 2014	Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kota Bukittinggi Tahun 2014-2017.	DP3APPKB
35	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-59-2017 Tahun: 2017	Penerapan Kelurahan Belakang Balok Sebagai Rute Aman Sekolah di Kota Bukittinggi.	Dinas Perhubungan
36	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-59-2017 Tahun: 2017	Penerapan Kelurahan Belakang Balok Sebagai Rute Aman Sekolah di Kota Bukittinggi.	
37	Keputusan Walikota	188.45-59-2017 Tahun: 2017	Penerapan Kelurahan Belakang Balok Sebagai Rute Aman Sekolah di Kota Bukittinggi.	

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017/ 2018.

Tabel 8.3. Peraturan dan Kebijakan Daerah yang terkait Perlindungan Perempuan dan Anak.

No	Bentuk/ Jenis Peraturan	Nomor Peraturan	Judul Peraturan	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Ulasan/ Analisa
1	Peraturan Daerah Kota Bukittinggi	4 Tahun 2015	Perlindungan Perempuan dan Anak.	Kantor PPKB	
2	Peraturan Daerah	1 tahun 2015	Bangunan Gedung.	Dinas PUPR	<p>Pada Pasal 66 ayat 1:</p> <p>Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.</p> <p>Pasal 66 ayat 2:</p> <p>Penyedia tersedianya fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertical antar ruang dalam bangunan gedung, akses evakuasi</p>

					termasuk bagi penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.
3.	Keputusan Ka Dinas Kebakaran.	188.45.14/ Diskar- 02/2017	Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bahaya kebakaran dan Bencana bagi masyarakat.	Dinas Kebakaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan alat-alat pemadam kebakaran dan pencegahan bahaya kebakaran kpd anak PAUD serta Anak TK. - Memberikan pengetahuan kpd siswa SLTA thd pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran.
4	Keputusan Walikota	30 Tahun 2016	Pemanfaatan Teknolgi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.	Dinas Kominfo	
5	Keputusan Walikota Bukittinggi	188-45-202- 2015 Tahun: 2015	Perubahan Keputusan Walikota Nomor. 188- 45- 202 – 2015 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Seayun Selangkah Kota Bukittinggi Periode 2015- 2018.	DP3APPKB	
6	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-015- 2016 Tahun: 2016	Penetapan Kelurahan Benteng Pasar Atas Sebagai Kelurahan Layak Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB	
7	Keputusan Walikota	188.45-016- 2016	Penetapan Kelurahan Tarok	DP3APPKB	

	Bukittinggi	Tahun: 2016	Dipo Sebagai Kelurahan Layak Anak di Kota Bukittinggi.		
8	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-182-2015 Tahun: 2015	Penetapan Kelurahan Layak Anak di di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB	
9	Surat Edaran Walikota Bukittinggi	27/Din.Kes/II-2015 Tahun: 2015	Kawasan Tanpa Rokok.	DP3APPKB	
10	Surat Edaran Walikota Bukittinggi	478-25/ DP3APPKB/ I/2016 Tahun: 2016	Pemberian ASI Eksklusif.	DP3APPKB	
11	Surat Edaran Walikota Bukittinggi	478-22/ DP3APPKB/ I/2017 Tahun: 2017	Penyediaan Ruang Laktasi.	DP3APPKB	
12	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-012-2017 Tahun: 2017	Penunjukan Puskesmas Rasimah Ahmad sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB	
13	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-017-2016 Tahun: 2016	Penunjukan Puskesmas Gulai Bancah sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB	
14	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-018-2016 Tahun: 2016	Penunjukan Puskesmas Mandiangin sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB	
15	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-36-2015 Tahun: 2015	Penunjukan Puskesmas Plus Mandiangin sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB	
16	Keputusan Walikota	188.45-37-	Penunjukan	DP3APPKB	

	Bukittinggi	2015 Tahun: 2015	Puskesmas Guguk Panjang sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Bukittinggi.		
17	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-160-2016 Tahun: 2016	Penetapan Guguk Panjang Sebagai Kecamatan Layak Anak (KELANA) di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB	
18	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-107-2016 Tahun: 2016	Penetapan Aur Birugo Tigo Baleh Sebagai Kecamatan Layak Anak (KELANA) di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB	
19	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-142-2015 Tahun: 2015	Penetapan Mandiangin Koto Selayan Sebagai Kecamatan Layak Anak (KELANA) di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB	
20	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-92-2014 Tahun: 2014	Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kota Bukittinggi Tahun 2014-2017.	DP3APPKB	
21	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-59-2017 Tahun: 2017	Penerapan Kelurahan Belakang Balok Sebagai Rute Aman Sekolah di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB	
22	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-59-2017 Tahun: 2017	Penerapan Kelurahan Belakang Balok Sebagai Rute Aman Sekolah di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB	
23	Keputusan Walikota	188.45-59-2017 Tahun: 2017	Penerapan Kelurahan Belakang Balok Sebagai Rute Aman Sekolah di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB	
24	Keputusan Lurah Belakang Balok	188.45/08/KP TS/BB/I-2016 Tahun: 2016	Penetapan Pengurus Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan	DP3APPKB	

			Belakang BALok Kec. ABTB periode 2016- 2018.		
25	Keputusan Lurah Birugo	188.45/04/PM E-BRG/2016 Tahun: 2016	Penetapan Pembentukan Kepengurusan Kelompok Bina Remaja Birugo indah kelurahan Birugo Kota Bukittinggi masa bakti 2016-2020.	DP3APPKB	
26	Keputusan Lurah LAdang Cangkiah	188.45.10/KP TS/LC/VI/2016 Tahun: 2016	Susunan Pengurus dan KAdler Bina Keluarga Remaja kelurahan LAdang Cangkiah Kec. ABTB masa bakti 2016-2020.	DP3APPKB	
27	Keputusan Lurah Campago Guguak Bulek	188.45/12/PM E-PPK/III/2016 Tahun: 2016	Pembentukan Kepengurusan Kelompok Bina Keluarga Remaja Mekar Kelurahan Campago Guguak Bulek Kec. MKS masa bakti 2016- 2020.	DP3APPKB	
28	Keputusan Lurah Kubu Tanjung	08/Kepts/KT/V /2016 Tahun: 2016	Susunan Pengurus dan KAdler Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Kubu Tanjung Kec. ABTB masa bakti 2016-2020.	DP3APPKB	
29	Peputusan Lurah Pakan Kurai	05/Kepts/PK/I/ 2016 Tahun: 2016	Susunan Pengurus dan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Pakan Kurai Kec. Guguak Panjang thn 2016-2020.	DP3APPKB	
30	Keputusan Lurah Bukit Apit Puhun	440/01/BAP/I/ 2016 Tahun: 2016	Susunan Pengurus dan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan	DP3APPKB	

			Bukit Apit Puhun Kec. Guguak Panjang th 2016- 2020.		
31	Keputusan Lurah Puhun Pintu Kabun	188.45/08/PM E-PPK/II-2016 Tahun: 2016	Penerapan Pembentukan Kepengurusan Kelompok Bina Keluarga Remaja Kuriman Sejahtera Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kec. MKS Kota Bukittinggi masa bhakti 2016-2020.	DP3APPKB	
32	Keputusan Lurah Parit Antang	188.45/05/KP TS/PA/II/2016 Tahun: 2016	Pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kelurahan Parit Antang thn 2016- 2020.	DP3APPKB	
33	Keputusan Kelurahan Belakang Balok	188.45/05/Kpt s-BB/I-2016 Tahun: 2016	Pembentukan Kelompok Pelaksana Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Kelurahan Belakang Balok periode 2016- 2018.	DP3APPKB	
34	Keputusan Lurag Campago Guguak Bulek	188.45/14/PM E-PPK/III- 2016 Tahun: 2016	Penetapan Pembentukan Kepengurusan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Seroja Kel. Campago Guguak Bulek Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi 2016- 2020.	DP3APPKB	

35	Keputusan Lurah Pulai Anak Air	188.45/II/PME-PPK/II-2015 Tahun: 2015	Pembentukan Kepengurusan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pulai Anak Air Kel. Pulai ANak Air Kec. MKS Kota Bukittinggi masa bakti 2015-2019.	DP3APPKB	
36	Keputusan Lurah Puhun Pintu Kabun	188.45/6/PME-PPK/II-2016 Tahun: 2016	Penetapan Pembentukan Kepengurusan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kuriman Sejahtera Kel. Puhun Pintu Kabun Kec. MKS Kota Bukittinggi masa bakti 2016-2020.	DP3APPKB	
37	Keputusan Lurah Aur Kuning	188.45/B/PME-AK/III-2016 Tahun: 2016	Penetapan Pembentukan Kepengurusan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kel. Aur Kunung Kec. ABTB Kota Bukittinggi masa bakti 2016-2020.	DP3APPKB	

Tabel 8.4. Daftar Lembaga Masyarakat/Organisasi Masyarakat/LBH yang Peduli Perempuan dan Anak Tahun 2018.

Kec.	Nama Kelembagaan/ LSM/LBH	Nama Pimpinan/Ketua	Alamat Kantor
MKS	Parik Paga Campago Guguak Bulek.	Donny Syahputra, S.HI	Jl. Mr Asaat No. 43 Kel Campago Guguak Bulek.
	For De Kock Society in Sosial (Forsis).	Khairul Anwar, S.Ag, MH	Jl. H. Abdul Manan No. 3 Kel. Campago Guguak Bulek.
	Flora Training Center.	Nentien Destri, AMk. M.Pd	Jl. Abdul Manan Sarajo Kel. Guguak Bulek.
GP	LKS Kita Semua Sama (KISESA).	Antoni Firdaus	Jl. Tuanku Kubu RT. 001 RW. 001 Kel Kayu Kubu.
	Persatuan Olahraga Pernafasan Indonesia (PORPI).	Yusra Adek, S.Sos, MM	Jl. Ahmad Yani, No. 95 Kel. Benteng Pasar Atas.

Sumber: Kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi Tahun 2019.

B. Bidang Sosial Budaya

1. Anak Jalanan

Tabel 8.5. Jumlah Anak Jalanan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2015, 2016 dan 2017.

No	Kecamatan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	MKS	1	0	1	6	1	7	6	2	8
2	GP	-	-	-	9	10	19	7	7	14
3	ABTB	1	0	1	1	-	1	2	1	3
Jumlah		2	0	2	16	11	27	15	10	25

Sumber: Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bukittinggi Tahun 2017.

Menurut Permensos No. 08 Tahun 2012, anak jalanan merupakan anak yang rentan bekerja di jalanan dan/atau menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan. Berdasarkan tabel di atas anak jalanan terbanyak pada tahun 2016 dan 2017 berada di kecamatan Guguk Panjang, dan jumlahnya sama banyak antara laki-laki dan perempuan.

Untuk Tahun 2018 tidak ditemukan lagi anak jalanan berdasarkan data dari Dinas Sosial Tahun 2019. Hal ini menunjukkan berhasilnya penanganan kasus anak jalanan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

2. Anak Terlantar

Tabel 8.6. Jumlah Anak Terlantar (Karena Putus Sekolah) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No	Kecamatan	Jumlah
1	MKS	10
2	GP	1
3	ABTB	1
Jumlah		12

Sumber: Dinsos Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Anak terlantar sesuai dengan Permensos No. 08 Tahun 2012, merupakan seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Dari tabel diatas terlihat anak terlantar karena putus sekolah menurut kecamatan tahun 2018 sebanyak 12 orang.

3. Anak yang ditampung Panti Asuhan

Tabel 8.7. Jumlah Anak yang Ditampung di Panti Asuhan dan Non Panti Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2016 , 2017 dan 2018

No	Kec.	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	GP	31	43	74	31	43	74	31	33	64
2	MKS	10	10	20	10	10	20	10	10	20
3	ABTB									
Jumlah		41	53	94	41	53	94	41	43	84

Sumber : Dinsos Kota Bukittinggi Tahun 2019.

4. Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan

Tabel 8.8. Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2016 dan 2017 dan 2018

No	Kec.	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018
		L	L	L	L	P	L+P	L+P
1	GP	3	3	6	3	0	3	3
2	MKS	3	3	6	5	2	7	4
3	ABTB	2	1	3	4	1	5	7
Jumlah		8	7	15	12	3	15	14

Sumber: Dinsos Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan sesuai dengan Permensos No 08 Tahun 2012, merupakan seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri, kemabli dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau menjalani kehidupan secara normal. Menurut tabel diatas , jumlah bekas warga binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP) adalah sebanyak 14 orang lebih sedikit dari pada tahun sebelumnya.

5. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi .

Tabel 8.9. Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2016 sd 2018.

No	Kecamatan	Tahun		
		2016	2017	2018
1	GP	476	211	324
2	MKS	472	424	297
3	ABTB	200	185	189
Jumlah		1148	820	810

Sumber: Dinsos Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Perempuan rawan sosial ekonomi dengan Permensos No. 08 Tahun 2012 merupakan seorang perempuan dewasa menikah/belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Berdasarkan tabel di atas, jumlah perempuan rawan social dan ekonomi terbanyak di kecamatan Guguk Panjang sebanyak 324 orang.

6. Penduduk Lansia Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Table 8.10. Persentase Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk Umur 60 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No.	Pendidikan Tertinggi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1	Tidak Punya Ijazah	22,83	36,03	30,02
2	SD Sederajat	21,54	19,6	20,48
3	SLTP sederajat	11,67	14,13	13,01
4	SLTA sederajat	27,85	19,65	23,39
5	Diploma I/II	0	3,47	1,89
6	Diploma III/ Akademi	4,54	5,5	5,06
7	Diploma IV/S1	10,81	1,62	5,8
8	S2	0,76	0	0,35
9	S3	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas BPS Kota Bukittinggi Tahun 2019

BAB IX

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

A. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Tabel 9.1. Perempuan Korban Kekerasan menurut umur Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No	Kecamatan	Kelompok Umur			Total
		0-<18	18->25	>25	
1	G..Panjang	4	4	9	17
2	MKS	6	1	3	10
3	ABTB	2	0	3	5
Jumlah		12	5	15	32

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Berdasarkan tabel di atas yang menjadi korban kekerasan berada pada anak di bawah umur dan di atas usia 25 tahun, pada umumnya anak korban kekerasan selalu di bujuk rayu dan di iming-imingi dengan recehan sehingga anak menjadi penurut dan tidak mampu menolak atau melakukan perlawanan kepada pelaku. Sedangkan kekerasan di atas 25 tahun diantaranya adalah perselisihan di rumah tangga.

Tabel 9.2. Perempuan Korban Kekerasan menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No	Kecamatan	Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat Sekolah	SD	SLTP	SLTA	PT
1	G.Panjang	0	2	2	4	7	2
2	MKS	1	3	2	0	3	1
3	ABTB	0	1	0	2	1	0
Jumlah		1	6	4	6	11	3

Sumber: P2TP2A Kota Bukittinggi.Tahun 2019

Dari data di atas dapat menunjukkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan cenderung berpendidikan rendah, Tingkat pengetahuan yang rendah

dan kurangnya Informasi menjadi faktor pemicu kekerasan terhadap perempuan. Majunya pendidikan juga turut mengurangi munculnya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Untuk itu kesadaran akan pentingnya masyarakat untuk bisa mengecap pendidikan perlu digalakkan. Disamping itu masyarakat juga perlu memiliki pengendalian emosi dan penghargaan terhadap perempuan.

Tabel 9.3. Perempuan Korban Kekerasan menurut Status Pekerjaan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No	Kec.	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	Buruh/ Karyawan / Pegawai	Pekerjaan bebas di Pertanian	Pekerjaan bebas di Non Pertanian	Pekerjaan Keluarga	Pelajar/ lain-lain
1	G..P	1	6	0	0	0	5	4
2	MKS	0	0	1	0	0	3	6
3	ABTB	0	0	0	0	0	3	2
Jumlah		1	6	1	0	0	11	12

Sumber: P2TP2A Kota Bukittinggi.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan cenderung terjadi pada pelajar dan pekerja rumah tangga, ini disebabkan karena :

- Anak terutama pelajar cenderung tidak akan mengadakan kekerasan yang di alami karena khawatir akan menjadi pihak yang disalahkan;
- Anak sekolah mudah terpengaruh dengan bujuk rayu orang dewasa;
- Tingkat ketakutan yang tinggi terhadap orang dewasa;
- Penyalahgunaan gadget pada anak;
- Mudah dibujuk rayu dengan pemberian uang atau hadiah;
- Belum punya pengetahuan dan memahami tentang pendidikan seks;
- Kurangnya pengawasan orang tua dan keluarga;
- Kurangnya pengetahuan agama dalam keluarga.

Tabel 9.4. Perempuan Korban Kekerasan menurut Status Perkawinan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No	Kecamatan	Belum Kawin	Kawin	Cerai Mati	Cerai hidup
1	G.Panjang	7	8	0	1
2	MKS	6	3	0	1
3	ABTB	2	3	0	0
Jumlah		15	14	0	2

Sumber: P2TP2A Kota Bukittinggi. Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas yang menjadi korban kekerasan adalah perempuan yang belum kawin dan sudah kawin, hal ini disebabkan karena korban yang belum kawin tergolong kepada anak yang sangat mudah dibujuk, diperdaya, jiwa yang masih labil dan takut kepada ancaman orang dewasa, sehingga mereka tidak mempunyai kekuatan dan perlawanan atas kekerasan yang dialaminya, ketidak mengertian tentang seks serta ketidak tahuan kepada siapa akan melaporkan atas kekerasan yang dialaminya.

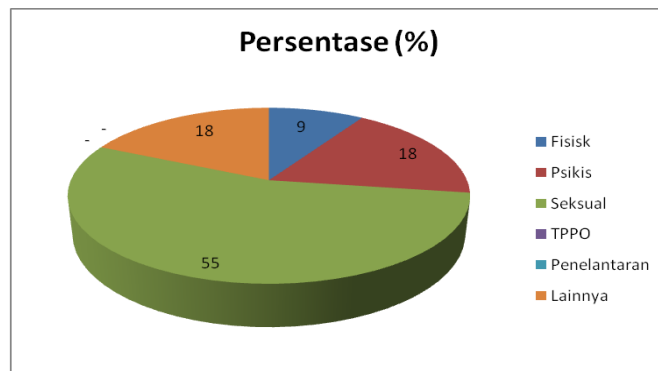
Adapun kekerasan terhadap perempuan yang sudah kawin, kebanyakan pelakunya adalah dari keluarga sendiri atau suami. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara membina ketenangan dalam rumah tangga. Dan memperdalam ilmu agama.

Tabel 9.5. Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018 .

No	Kecamatan	Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lainnya
1	MKS	2	6	2	1	4	1
2	GP	1	5	2	0	0	0
3	ABTB	0	7	0	0	0	0
Jumlah		3	18	4	1	4	1

Sumber: P2TP2A Kota Bukittinggi.

Gambar 9.1. Persentase Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan di Kota Bukittinggi.



Gambar di atas menunjukkan sebagian besar (55%) kekerasan yang dialami perempuan adalah kekesarasan Seksual, hal ini di sebabkan :

- Posisi perempuan yang dianggap lemah.
- Media elektronik yang bisa di akses bebas untuk menayangkan tentang pornografi dan pornoaksi.
- Pergaulan bebas.
- Kurangnya pengawasan orang tua dan masyarakat.
- Kurangnya pemahaman agama.

Tabel 9.6. Perempuan Korban Kekerasan menurut Tempat Kejadian Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya
1	G.Panjang	8	3	5
2	MKS	7	0	3
3	ABTB	3	0	2
Jumlah		18	3	10

Sumber: P2TP2A Kota Bukittinggi. Tahun 2019

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan lebih sering terjadi di rumah.tangga. Kekerasan dirumah tangga sering terjadi karena adanya pemicu lain seperti masalah ekonomi, pertengkaran suami istri atau penyebab lainnya.

Tabel. 9.6. Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Pelayanan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No	Kec.	Penanganan Pengaduan	Pelayanan Kesehatan	Rehabilitasi Sosial	Penegakan & Bantuan Hukum	Pemulangan & Reintegrasi
1	G.Panjang	17	0	0	0	0
2	MKS	10	0	0	0	0
3	ABTB	4	0	0	0	0
Jumlah		31	0	0	0	0

Sumber: P2TP2A Kota Bukittinggi. Tahun 2019

Dari 31 orang yang datang ke P2TP2A, jenis layanan yang diberikan, adalah penanganan pengaduan .

Tabel 9.7. Perempuan Korban Kekerasan menurut Frekuensi Kekerasan Per Kecamatan di kota Bukittinggi Tahun 2018.

No	Kecamatan	Frekuensi Kekerasan		
		Baru	Berulang	Rujukan
1	G.Panjang	16	1	0
2	MKS	9	1	0
3	ABTB	4	0	0
Jumlah		29	2	0

Sumber: P2TP2A Kota Bukittinggi. Tahun 2019

Para korban perempuan yang melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, pada umumnya didominasi oleh kasus baru, hanya 2 orang yang datang berulang. Sehingga, mereka hanya melaporkan kejadiannya sekali dan dilanjutkan dengan konsultasi lanjutan. Pelaporan biasanya dilakukan setelah terjadi kekerasan fisik maupun psikis yang berulang. Saat perempuan itu sudah benar-benar tidak sanggup lagi menanggung kekerasan, mereka baru melaporkan kepada P2TP2A.

Tabel 9.8. Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	KECAMATAN	TINGKAT PENDIDIKAN					
		TIDAK/ BELUM	BELUM TAMAT SD	SD	SLTP	SLTA	PT
1	GP	0	0	4	4	9	0
2	MKS	0	0	3	1	6	0
3	ABTB	0	1	0	2	1	0
JUMLAH		0	1	7	7	16	0

Sumber : P2TP2A Kota Bukittinggi Tahun 2019

Tingkat pendidikan pelaku kekerasan yang dilaporkan ke P2TP2A pada umumnya adalah berpendidikan SLTA, beberapa adalah berpendidikan di SLTP, SD dan belum tamat SD. Hal ini berarti tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang. .

Tabel 9.9. Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan menurut Status Pekerjaan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	KECAMATAN	BERUSAHA SENDIRI	BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP	PEKERJAA N BEBAS DI PERTANIA N	PEKERJAA N BEBAS DI NON PERTANIA N	PEKERJA AN KELUAR GA	PELAJ AR/ LAIN- LAIN
1	GP	3	2	2	0	1	0
2	MKS	1	3	2	0	0	0
3	ABTB	1	1	0	0	0	0
JUMLAH		5	6	4	0	1	0

Sumber : P2TP2A Kota Bukittinggi Tahun 2019

Pelaku kekerasan yang diadukan ke P2TP2A terlihat bahwa banyak terjadi pada buruh tidak tetap dan yang berusaha sendiri.

Pelaku yang melaksanakan kekerasan pada umumnya terjadi akibat adanya beberapa tekanan di dalam dirinya, sehingga pelampiasannya adalah orang lain yang terdekat.

Tabel 9.10. Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan menurut Hubungan Dengan Korban Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	KECAMATAN	HUBUNGAN DENGAN KORBAN			
		SUAMI	ORANG TUA	KELUARGA	KELUARGA LAINNYA
1	GP	8	3	0	6
2	MKS	4	5	0	1
3	ABTB	2	1	0	1
JUMLAH		14	9	0	8

Sumber : P2TP2A Kota Bukittinggi Tahun 2019

Pada tahun 2018, kasus kekerasan pada perempuan di ranah komunitas 60% pelaku kekerasan adalah orang dekat, dan dari tabel di atas bisa dibaca rata-rata pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban seperti suami, orang tua dan keluarga lainnya.

B. Kekerasan Terhadap Anak

Tabel 9.11. Jumlah Anak Korban Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan dan Jenis Kelamin, Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

NO	KEC.	JENIS KEKERASAN											
		FISIK		PSIKIS		SEKSUAL		EKSPLOITASI		PENELAN TARAN		LAINNYA	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	GP	0	0	4	4	3	2	1	0	0	0	2	0
2	MKS	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	1
3	ABTB	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
JUMLAH		2	1	6	4	3	2	1	0	0	1	5	2

Sumber : P2TP2A Kota Bukittinggi Tahun 2018

Kekerasan pada anak biasanya terjadi secara Fisik, psikis dan seksual, dan lebih banyak terjadi pada anak perempuan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi terhadap anak, adalah:

1. Kekerasan fisik; yang termasuk kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat tubuh yang menyebabkan

kematian ataupun tidak. Bentuk-bentuknya antara lain memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata, membunuh.

2. Kekerasan psikologi/mental; kekerasan ini meliputi perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya, seperti berteriak-teriak, mengancam, merendahkan, menyumpah serapah, melecehkan, menguntit, dan memata-matai serta tindak-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut yang ditujukan kepada korban atau keluarga dekatnya.
3. Kekerasan ekonomi; kekerasan ini adalah setiap perbuatan yang mengeksploitasi anak atau menelantarkan anggota keluarga, misalnya kelalaian memberikan kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan sebagainya.
4. Kekerasan seksual; kekerasan mencakup pelecehan seksual sampai memaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, bentuk-bentuk tersebut misalnya menyentuh, meraba, mencium, memaksa korban melihat pornografi, ucapan yang merendahkan, melecehkan atau menyakiti korban. Untuk kekerasan seksual ini, si pelaku biasanya orang dekat yang nekat melakukannya.

Tabel 9.12. Korban Eksploitasi Seksual Anak Menurut Tempat Kejadian dan Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

NO	KEC	TEMPAT KEJADIAN											
		CAFE		PANTI PIJAT		HOTEL/ TEMPAT PENGINAP AN		LAINNYA		PENELAN TARAN		LAINNYA	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	MKS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	GP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ABTB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Sumber: P2TP2A Kota Bukittinggi.

Eksploitasi seksual merupakan bentuk paksaan dan kekerasan terhadap anak dan sejumlah tenaga kerja paksa dan bentuk perbudakan modern. Sebuah pernyataan dari Kongres Dunia untuk melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak,

yang diselenggarakan di Stockholm pada tahun 1996, mendefinisikan sebagai: pelecehan seksual oleh orang dewasa dan remunerasi tunai atau barang kepada anak atau orang ketiga atau orang lain. Anak diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial termasuk pelacuran anak, pornografi anak, pariwisata seks anak dan bentuk lain dari transaksional seksual dimana seorang anak terlibat dalam kegiatan seksual untuk dapat memiliki kebutuhan utama yang terpenuhi, seperti makanan, tempat tinggal atau akses ke pendidikan. Ini termasuk bentuk transaksional seksual dimana kekerasan seksual terhadap anak tidak dihentikan atau dilaporkan oleh anggota keluarga, karena manfaat yang diperoleh oleh keluarga dari pelaku. juga berpotensi mencakup perjodohan yang melibatkan anak di bawah usia 18 tahun, dimana anak belum bebas menyetujui pernikahan dan dimana anak mengalami pelecehan seksual.

Tabel 9.13. Lembaga Layanan Yang Menangani Anak Korban Kekerasan, Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

NO	KEC	RP TC	LB H	PK T	PP T	UPP A	TRAUM A CENTE R	WOMAN CRISIS CENTER	SHELTER	RUMAH SINGGA H	RPSA	PANTI ASUHAN ANAK	P2TP2A
1	GP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	MKS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3	ABTB	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
JUMLAH		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1

Sumber : P2TP2A Kota Bukittinggi Tahun 2018

P2TP2A adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban kekerasan, melalui wahana operasional pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah daerah. Di antara upaya yang dilakukan adalah pelayanan pelaporan/pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulihan korban secara pelayanan bantuan dan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, pendampingan tokoh agama, konsultasi dan berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak.

Kota Bukittinggi adalah kota terbesar kedua di Sumatera Barat. Selain itu, Bukittinggi juga menjadi pusat perdagangan dan wisata. Ini jelas berdampak pada kompleksnya persoalan sosial kemasyarakatannya. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mencoba hadir dan memberi jalan

keluar dalam persoalan pemberdayaan perempuan dan anak. Pada akhir tahun 2009 P2TP2A Saayun Salangkah didirikan di Kota Bukittinggi, yang operasionalnya dimulai pada tahun 2010.

Tabel 9.14. Jumlah Korban Kekerasan Pada Anak Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

NO	KEC	JENIS PELAYANAN YANG DIBERIKAN									
		PENANGANAN PENGADUAN		PELAYANAN KESEHATAN		REHABILITASI SOSIAL		PENEGAKAN & BANTUAN HUKUM		PEMULANGAN & REINTEGRASI	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	MKS	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2	GP	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ABTB	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		12	11	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: P2TP2A Kota Bukittinggi.

Dampak kekerasan terhadap anak, apa pun tujuannya, sama sekali tidak bisa dianggap sepele. Kita bisa melihatnya dari penelitian UNICEF yang mengumpulkan dan menyusun berbagai dampak perlakuan kejam terhadap anak. Penyusunan itu kemudian digolongkan ke dalam empat area, yaitu kesehatan fisik, kesehatan mental, keluaran kekerasan, dan dampak terhadap pendidikan dan ketenagakerjaan.

BAB X

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan data yang telah dikemukakan pada profil gender dan anak Kota Bukittinggi Tahun 2019, terdapat beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap penilaian keadilan dan kesetaraan gender antara lain:

1. Ketersediaan data

- a. Ketersediaan data sangat penting dalam menyusun suatu analisa yang tepat. Sehingga dapat digunakan oleh para pemangku dan pengambil kebijakan di Kota Bukittinggi untuk mengevaluasi kembali perencanaan pembangunan yang sudah berlangsung maupun program pembangunan yang akan datang, apakah sudah responsive gender.
- b. Data terpilah perlu dijadikan isu strategis di seluruh sektor baik instansi pemerintah atau non pemerintah, lembaga masyarakat serta semua lini pembangunan mulai dari Tingkat Kota maupun tingkat kecamatan sampai kelurahan sehingga akan mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam pembuatan format serta diskripsi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis gender dan anak.

2. Kependudukan

- a. Dari Proyeksi penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 94. Komposisi Penduduk perempuan yang produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang produktif yaitu 52% berbanding 48%,
- b. Kepemilikan KTP elektronik pada perempuan tahun 2018 sebanyak 97,3 % sedangkan kepemilikan akte kelahiran perempuan usia 0-18 tahun sebanyak 92,5 % .
- c. 17,39% kepala keluarga di Kota Bukittinggi adalah perempuan, hal ini berarti perempuan haruslah memiliki kemampuan baik secara ekonomi, moral dan spiritual untuk menjadi pengambil keputusan di rumah tangganya.

3. Pendidikan

- a. Perempuan memiliki Angka Partisipasi Sekolah hampir sama dengan laki-laki, yang berarti kesempatan perempuan untuk mengakses pendidikan telah menambah angka partisipasi wanita dalam pendidikan. Konsekuensinya terhadap perencanaan pembangunan yang harus dilakukan pemerintah adalah menyediakan lapangan kerja bagi penduduk perempuan.
- b. Hampir seluruh penduduk Kota Bukittinggi sudah bisa baca tulis (99,88%) hanya 0,12% penduduk perempuan yang masih buta huruf. Hal ini menunjukkan pencapaian pendidikan dasar yang efektif dan berhasilnya program keaksaraan.

4. Kesehatan

- a. Angka kematian Ibu pada tahun 2018 yaitu sebanyak 2 kasus, penyebab kematian ibu tersebut adalah karena pendarahan dan sebab lainnya. Terjadinya pendarahan pada ibu berkaitan dengan terjadinya kekurangan darah atau defisiensi zat besi selama kehamilan. Sedangkan angka kematian pada bayi mengalami penurunan dari 4,2/1000 kelahiran hidup pada tahun 2017 menurun menjadi 0,81 /1000 kelahiran hidup tahun 2018.
- b. Peningkatan kasus baru HIV AIDS di Bukittinggi tidak saja terjadi pada laki-laki tetapi kasus juga ada pada perempuan, Tahun 2018 ditemukan 64 kasus laki-laki dan 11 orang perempuan. , diperlukan upaya yang lebih maksimal untuk bisa menekan munculnya kasus baru.
- c. Partisipasi KB aktif masih di dominasi oleh perempuan, karena hanya 3,08 % laki-laki yang berpartisipasi aktif untuk ber-KB. Diperlukan terobosan yang mampu meningkatkan partisipasi KB pria.
- d. Usia perkawinan pertama sebagian besar warga Bukittinggi adalah pada usia 21 sampai dengan 30 tahun, terdapat 2 orang laki-laki yang menikah usia kurang dari 19 tahun dan 1 orang perempuan menikah usia kurang dari 16 tahun.

5. Ekonomi dan Ketenagakerjaan

- a. Keterlibatan perempuan pada kegiatan ekonomi (pasar kerja) lebih rendah dari pada laki-laki, ditandai dengan rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja perempuan dibandingkan laki-laki. Laki-laki 80,27% sedangkan perempuan 57,097 %.

- b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bukittinggi pada tahun 2018 sebesar 68,68 %.
 - c. Lapangan pekerjaan yang terbanyak baik laki-laki maupun perempuan banyak pada lapangan pekerjaan perdagangan, eceran, rumah makan, hotel dan jasa.
6. Politik dan pengambil keputusan.
- a. Masih perlu dipersiapkan perempuan-perempuan yang berpotensi dan tertarik untuk terjun ke dunia politik praktis (legislatif), untuk dapat dipersiapkan duduk bersaing dengan laki-laki menjadi caleg caleg yang dipercaya masyarakat
 - b. Masih sedikitnya Pengambil keputusan di Kota Bukittinggi yang berjenis kelamin perempuan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil belum sepenuhnya memihak kepada kepentingan perempuan.
7. Hukum dan Sosial Budaya
- a. Kebijakan-kebijakan yang responsif gender di Kota Bukittinggi sudah mulai digerakkan, terbukti sudah terdapatnya beberapa SKPD yang sudah memprakarsai perencanaan yang berbasis gender.
 - b. Permasalahan sosial masih memerlukan perhatian yang komprehensif dari semua pihak, karena pemecahan permasalahan sosial disebabkan oleh berbagai macam sebab, seperti ekonomi, keluarga, masyarakat dan pemahaman agama.
8. Kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dilaporkan pada tahun 2018 belum dapat menggambarkan situasi yang sesungguhnya, karena budaya malu yang ada pada masyarakat kita masih menjadikan kasus kekerasan ini tidak semua yang dilaporkan. Disamping itu perlu upaya maksimal untuk memperkenalkan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bukittinggi ke masyarakat agar masyarakat tahu kemana harus melaporkan kekerasan yang dialami baik dirinya maupun lingkungan sekitarnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditulis pada buku Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2019 ini, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan:

1. Perlu dilakukan koordinasi, kerjasama dan komunikasi yang lebih baik antar lembaga-lembaga yang terlibat dalam program pengarusutamaan gender dan anak untuk dapat mempersiapkan data dan informasi yang lebih lengkap, mudah dan efektif.
2. Perlu dilaksanakan pengkajian yang mendalam terhadap hasil analisa dan peranan masing-masing lembaga dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi keadilan dan kesetaraan gender di Kota Bukittinggi.